



ISBN : 979 467 321.8
Katalog BPS : 4103 12

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA UTARA TAHUN 2006



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT SUMATERA UTARA TAHUN 2006

ISBN : 979 467 321.8
KATALOG BPS : 4103.12

UKURAN BUKU : 27.94 CM X 21.59 CM
JUMLAH HALAMAN : VII + 63

NASKAH :
BIDANG STATISTIK SOSIAL
BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

TIM PENYUSUN NASKAH :

PENANGGUNGJAWAB : Drs. ALIMUDDIN SIDABALOK, MBA
EDITOR PENANGGUNGJAWAB : Ir. SUKARDI, M.Si.
KOORDINATOR : Dra. MINDA F. GINTING
ANGGOTA : Ir. RUDI H., AULIA M., SONI SAGITA,
RENY A.NOVIANTI, KHRESNA, NURZAKIAH

GAMBAR KULIT :

BIDANG STATISTIK SOSIAL
BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

SUMBER DANA :

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI SUMATERA UTARA T.A. 2007

DITERBITKAN OLEH :

BPS PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Asrama No. 179 Medan Telp. (061) 8452343, Fax (061) 8452773
Medan 20123

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara telah dapat menyelesaikan penyusunan publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara Tahun 2006.

Publikasi ini menyajikan informasi dasar tentang Indikator Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari Kependudukan, Pendidikan dan Sosial Budaya, Kesehatan dan Gizi, Ketenagakerjaan, Fertilitas dan Keluarga Berencana, Konsumsi dan Pengeluaran Rumahtangga, serta Perumahan dan Lingkungan. Selain itu, publikasi ini juga menyajikan informasi tentang status pembangunan manusia di Sumatera Utara. Diharapkan publikasi ini sekaligus dapat menjadi dasar dan acuan untuk melihat kondisi kesejahteraan rakyat dan sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia di Sumatera Utara.

Akhirnya semua kritik dan saran, sangat kami hargai untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dan meridhoi usaha-usaha yang mulia ini, sehingga memberikan manfaat bagi bangsa dan negara ini. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta untuk mewujudkan publikasi ini.

Medan, Desember 2007

KEPALA,

**(Drs. Alimuddin Sidabalok, MBA)
NIP.340003903**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
PENJELASAN TEKNIS	1
1.1. KEPENDUDUKAN	10
1.1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk	11
1.1.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan	14
1.1.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)	16
1.1.4. Kepadatan Penduduk	19
1.2. PENDIDIKAN	21
1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah	21
1.2.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	22
1.2.3. Angka Buta Huruf	24
1.3. KESEHATAN DAN GIZI	26
1.3.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)	26
1.3.2. Penolong Kelahiran	27
1.3.3. Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate)	28
1.3.4. Angka Harapan Hidup	29
1.4. KETENAGAKERJAAN	31
1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	31
1.4.2. Lapangan Pekerjaan	34
1.4.3. Status Pekerjaan	36
1.4.4. Jam Kerja	38

	<i>Halaman</i>
1.5. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA	42
1.5.1. Usia Perkawinan Pertama	43
1.5.2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate)	45
1.5.3. Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Golongan Umur dan Alat/Cara KB Yang Digunakan	46
1.6. KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA	50
1.6.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita	50
1.6.2. Pengeluaran Untuk Makanan	53
1.6.3. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan	54
1.7. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	56
1.7.1. Luas Lantai	57
1.7.2. Sumber Penerangan	59
1.7.3. Sumber Air Minum	59
1.7.4. Tempat Buang Air Besar	61
1.7.5. Penggunaan Jenis Dinding dan Atap Rumah	62

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota 2000-2006	13
Tabel 1.1.2. Komposisi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kelompok Umur, 2002 - 2006 (%)	14
Tabel 1.1.3. Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2002-2006, (%)	16
Tabel 1.1.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2002-2006 (%)	18
Tabel 1.1.5. Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2006	20
Tabel 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah Provinsi Sumatera Utara, 2005 - 2006	22
Table 1.2.2. Persentase Penduduk 10 Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2006	23
Table 1.2.3. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2006	25
Tabel 1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara, 2006	32
Tabel 1.4.2. Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara, 2006.....	33
Tabel 1.4.3. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Lapangan Usaha (%)Provinsi Sumatera Utara, 2006 ..	34
Tabel 1.4.4. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Pekerjaan Provinsi Sumatera Utara, 2006 (%)	37

Tabel 1.4.5. Persentase Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Provinsi Sumatera Utara, 2006	39
Tabel 1.4.6. Persentase Pekerja Anak (10-14 Tahun) Provinsi Sumatera Utara, 2006	41
Tabel 1.5.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2006	44
Tabel 1.5.2. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Kabupaten/Kota, 2006.....	48
Tabel 1.5.3.: Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota. Dan Alat/Cara KB Yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2006	49
Tabel 1.6.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 2006	51
Tabel 1.6.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota, 2006	52
Tabel 1.6.3. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Provinsi Sumatera Utara, 2006	53
Tabel 1.6.4. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 2006	55
Tabel 1.7.1. Persentase Rumahtangga menurut Luas Lantai Provinsi Sumatera Utara, 2006.....	57
Tabel 1.7.2. Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum Provinsi Sumatera Utara, 2006	60
Tabel 1.7.3. Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2006	61



Tabel 1.7.4. Persentase Rumahtangga menurut Daerah Tempat Tinggal
Dan Jenis Dinding Terbanyak Provinsi Sumatera Utara, 2006 .. 63

Tabel 1.7.5. Persentase Rumahtangga menurut Daerah Tempat Tinggal
Dan Jenis Atap Terluas Provinsi Sumatera Utara, 2006 63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.1.: Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara,
1980-2006 (%) 12

Gambar 1.2.1. : Persentase Penduduk menurut Pendidikan dan Tipe
Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2006 24

Gambar 1.3.1.: Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri dengan Cara
Pengobatannya Provinsi Sumatera Utara, 2006 27

Gambar 1.3.2.: Persentase Penolong Persalinan Bayi Provinsi Sumatera
Utara, 2006 28

Gambar 1.3.3.: Kecenderungan IMR Provinsi Sumatera Utara, 1999-2006
..... 29

Gambar 1.3.4.: Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi
Sumatera Utara, 1999-2006 30

Gambar 1.4.1.: Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja
menurut Sektor A,M,S dan Tipe Daerah Provinsi
Sumatera Utara, 2006 35

Gambar 1.4.2.: Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja menurut
Status Pekerjaan, 2006 37

Gambar 1.4.3.: Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja menurut
Jumlah Jam Provinsi Sumatera Utara, 2006 40

Gambar 1.5.1.: Persentase Perempuan Dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2006	45
Gambar 1.5.2.: Perkembangan Tingkat Fertilitas (TFR) Provinsi Sumatera Utara,1999 - 2006	46
Gambar 1.7.1.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Luas Lantai Kurang dari 20 m2 menurut Kabupaten/Kota, 2006	58
Gambar 1.7.2.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Lantai Terlalu Terbuat dari Tanah Provinsi Sumatera Utara, 2006	58
	<i>Halaman</i>
Gambar 1.7.3.: Pesentase Rumahtangga Yang Menggunakan Sumber Penerangan dari Listrik PLN Provinsi Sumatera Utara, 2006	59
Gambar 1.7.4.: Pesentase Rumahtangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Sumatera Utara, 2006	62

PENJELASAN TEKNIS

1. KEPENDUDUKAN

- **Tipe Daerah**

Suatu desa tertentu termasuk daerah perkotaan atau pedesaan digunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel : **kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.**

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-10, nilai 1 adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per Km², nilai 2 adalah desa dengan kepadatan antara 500-999 orang per Km², dan demikian seterusnya sampai dengan nilai 10 yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 5000 orang per Km², dengan interval setiap kelas sebesar 500, kecuali kelas kedua dari terakhir yang intervalnya 1000.

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antar 1-10. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 95 persen atau lebih rumah tangga pertanian, dua jika 91-95 persen, dan seterusnya sampai dengan 10, jika desa mempunyai 25 persen atau kurang.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan berkisar antara 2-10, nilai 2 adalah desa tanpa fasilitas perkotaan sama sekali, nilai 3 jika fasilitas perkotaan ada satu buah, dan seterusnya sampai nilai 10 untuk desa yang memiliki minimal 8 jenis fasilitas perkotaan.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau

pedesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai lebih dari 23 digolongkan sebagai desa perkotaan. Desa-desa dengan skor antara 17-22 akan ditentukan berdasarkan penelitian lapangan tentang perkembangan masing-masing.

- **Kepadatan penduduk** adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi
- **Rata-rata pertumbuhan penduduk** adalah angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk pada tahun tertentu (dasar).
- **Rasio jenis kelamin** adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Angka ini dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- **Angka Beban Tanggungan (ABT)** adalah perbandingan antara kelompok anak-anak (umur 0-14 tahun) dan kelompok lansia (65 tahun atau lebih dengan usia produktif (15-64 tahun)).

2. PENDIDIKAN DAN SOSIAL BUDAYA

- **Sekolah** adalah kegiatan belajar di sekolah formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- **Tidak/belum pernah sekolah** adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- **Masih bersekolah** adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.

- **Tidak sekolah lagi** adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- **Tamat sekolah** adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- **Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan)** adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.

3. KESEHATAN DAN GIZI

- **Keluhan kesehatan** adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- **Imunisasi** adalah memasukkan kuman penyakit yang sudah dilemahkan kedalam tubuh agar tubuh mempunyai kekebalan terhadap penyakit tertentu.
- **Konsultasi** adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- **Pemeriksaan kesehatan** adalah pengamatan tingkat kesehatan seseorang baik karena mempunyai keluhan maupun untuk mengetahui ada tidaknya penyakit sedini mungkin. Pemeriksaan kesehatan dapat bersifat menyeluruh, atau sebagian dari tubuh, atau sebagian kecil saja dari tubuh.

- **Rawat jalan atau berobat jalan** adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri.
- **Rawat inap** adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- **Angka Kematian Bayi** adalah angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi berumur dibawah 1 tahun per 1000 kelahiran dalam satu tahun.
- **Angka Harapan Hidup** adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.
- **Angka Fertilitas Total** adalah banyaknya anak yang dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksinya dengan asumsi bahwa perilaku kelahirannya sama untuk setiap kelompok umur.

4. KETENAGAKERJAAN

- **Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan atau mengharapkan mendapat pekerjaan.
- **Bukan Angkatan Kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah

tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.

- **Kegiatan yang terbanyak dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- **Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- **Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja** adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen dan mogok.
- **Lapangan Usaha** adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- **Status pekerjaan** adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- **Jam kerja** adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)** adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun keatas).
- **Penduduk yang menganggur** adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk

menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

5. FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

- **Anak lahir hidup** adalah anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan walaupun hanya beberapa saat saja, seperti jantung berdenyut, bernapas dan menangis.
- **Angka Pertumbuhan Alamiah** adalah selisih antara angka kelahiran dan angka kematian.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor)** adalah orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor) baru** adalah orang yang baru pertama kali memakai/mempergunakan metode kontrasepsi dan akseptor sesudah persalinan/keguguran.
- **Peserta keluarga berencana (akseptor) aktif** adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- **Pasangan Usia Subur (PUS)** adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

6. KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

- **Konsumsi/pengeluaran rumah tangga** adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi dua macam, yaitu pengeluaran untuk makanan (termasuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (termasuk pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)

- **Konsumsi rata-rata per kapita setahun**, angka ini diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan 52.
- **Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan**, angka ini mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah dan juga termasuk minuman tembaku dan sirih dalam jangka waktu sebulan.
- **PDRB per kapita** adalah hasil bagi PDRB Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Pendapatan regional per kapita** diperoleh dengan cara membagi Produk Domestik Regional Netto (PDRN) atas dasar biaya faktor dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Pendapatan per kapita** adalah Produk Regional Netto dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
- **Konsumsi beras** mencakup keseluruhan beras termasuk beras ketan.
- **Konsumsi jagung** termasuk jagung pocelan, jagung basah, jagung kering dan tepung jagung yang keseluruhannya telah dikonversikan kedalam jagung pocelan.

7. PERUMAHAN

- **Bangunan fisik** adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- **Bangunan sensus** adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.

- **Luas lantai** adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- **Rumah tangga** adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Termasuk pula seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh dan mengurus keperluan sendiri.
- **Dinding** adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- **Atap** adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- **Air ledeng** adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- **Air Sumur/perigi terlindung** adalah bila lingkaran mulut sumur/perigi tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.
- **Kloset/dudukan leher angsa** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran berbentuk “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.

- **Plengsengan** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
- **Cemplung/cubluk** adalah jamban/kakus yang dibawah dudukannya tidak ada saluran langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhir.
- **WC lainnya** adalah yang tidak mempunyai tempat untuk duduk/jongkok termasuk yang tidak mempunyai jamban/kakus.

<http://sumut.bps.go.id>

1.1 KEPENDUDUKAN

Pada pelaksanaan pembangunan yang bersifat menyeluruh salah satu yang perlu mendapat perhatian yang serius diantaranya adalah aspek kependudukan yang mencakup antara lain mengenai : jumlah, komposisi, dan distribusi penduduk. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi modal pembangunan bila kualitasnya baik namun sebaliknya dapat menjadi beban (*dependency*) pembangunan bila kualitasnya rendah. Oleh sebab itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, dalam menangani aspek kependudukan ini, pemerintah tidak saja mengarahkan pada upaya pengendalian jumlah penduduk tetapi juga menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Disamping itu program perencanaan pembangunan sosial harus mendapat prioritas utama karena bermuara kepada peningkatan kesejahteraan penduduk.

Komposisi penduduk menurut struktur umur penduduk merupakan indikator penting untuk melihat sejauhmana beban tanggungan penduduk. Ketidakseimbangan komposisi antara kelompok umur produktif dengan non produktif akan menyebabkan permasalahan yang harus segera dicari jalan keluarnya. Demikian juga halnya dengan distribusi atau penyebaran penduduk antar wilayah, sangat dipengaruhi oleh tingkat pemerataan hasil pembangunan. Tingkat pemerataan hasil pembangunan akan mempengaruhi penyebaran dan tingkat kepadatan penduduk. Penduduk biasanya akan melakukan migrasi ke wilayah dimana terdapat fasilitas-fasilitas yang lebih baik dibanding wilayah yang ditempati sebelumnya

Untuk itu aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk seperti: arus migrasi, angka kelahiran dan kematian, turut serta di dalamnya menyangkut perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan politik serta pertahanan.

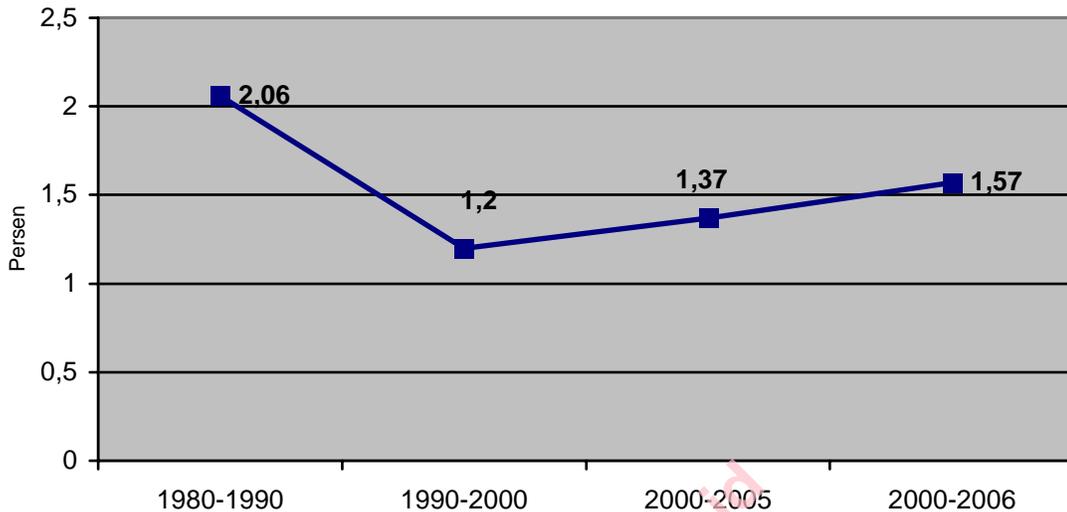
Data kependudukan sangat dibutuhkan baik oleh lembaga pemerintah ataupun non pemerintah. Dari data kependudukan dapat dibuat berbagai perencanaan kebutuhan fasilitas penunjang kesejahteraan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, tempat rekreasi dan fasilitas lainnya. Data kependudukan yang terkait diantaranya data tentang jumlah penduduk, kepadatan dan penyebaran penduduk serta data struktur umur penduduk.

1.1.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2006, jumlah penduduk Sumatera Utara yang bertempat tinggal tetap tercatat sebesar 12.643.494 jiwa. Meskipun secara absolut jumlah penduduk terus bertambah, namun secara relatif laju pertumbuhan penduduk selama 2 (dua) dekade (1980-2000) terus mengalami trend penurunan. Pada periode 1980-1990 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 2,06 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode 1990-2000 yang tercatat hanya sebesar 1,20 persen. Jumlah penduduk tahun 1990 tercatat sebanyak 10.256.027 jiwa sedangkan pada tahun 2000 meningkat menjadi 11.513.973 jiwa. Sedangkan pada periode 2000-2005 laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat yaitu tercatat sebesar 1,37 persen. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Sumatera Utara telah mencapai 12.326.678 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk kembali meningkat sebesar 1,57 persen pada periode 2000-2006.

Dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan kecenderungan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk tersebut permasalahan kependudukan di Sumatera Utara perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu, upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk disertai dengan adanya upaya peningkatan kesejahteraan penduduk merupakan suatu upaya yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan bersinergis dengan program-program pembangunan lainnya yang sedang dan akan dilaksanakan.

Gambar 1.1.1 Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara 1980-2006, (%)



Jika diperhatikan laju pertumbuhan penduduk periode 2005-2006, terlihat beberapa daerah yang laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi diatas 3 persen yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar 3,33 persen, dan Kabupaten Karo 3,19 persen. Tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah pada tahun 2000-2006 disebabkan daerah ini menjadi pusat perkembangan ekonomi baru di Pantai Barat dan daerah transit dari beberapa kabupaten sekitarnya seperti Kabupaten Nias, Nias Selatan, dan Tapanuli Selatan. Sedangkan tingginya laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo yang merupakan salah satu daerah agraris utama yang termasuk dalam kawasan Agropolitan di Sumatera Utara kemungkinan menjadi daya tarik bagi penduduk disekitar kabupaten lainnya untuk melakukan perpindahan ke daerah tersebut. Sebaliknya beberapa daerah lainnya di Sumatera Utara laju pertumbuhan penduduknya sangat rendah antara lain Kota Pematang Siantar sebesar -0,43 persen, Simalungun -0,29 persen dan Toba Samosir -0,24 persen. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk untuk kabupaten/ kota di Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel 1.1.1.

Tabel 1.1.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2000-2006

Kota/Kabupaten	Tahun			Laju Pertumbuhan / tahun (%)	
	2000 (jiwa)	2005 (jiwa)	2006 (jiwa)	2000-2005	2000-2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten					
1. Nias	683.416	441.807	442.019	1,33	0,71
2. Mandailing Natal	359.849	386.150	413.750	1,42	2,35
3. Tapanuli Selatan	734.364	626.702	629.212	1,83	1,67
4. Tapanuli Tengah	244.679	283.035	297.843	2,96	3,33
5. Tapanuli Utara	407.711	256.201	256.444	0,07	0,06
6. Toba Samosir	304.125	158.677	169.116	-0,96	-0,24
7. Labuhan Batu	844.924	951.773	987.157	2,41	2,63
8. Asahan	935.855	1.024.369	1.038.554	1,82	1,75
9. Simalungun	855.802	826.101	841.198	-0,70	-0,29
10. Dairi	292.857	261.287	267.629	0,20	0,54
11. Karo	283.713	316.207	342.555	2,19	3,19
12. Deli Serdang	1.959.488	1.596.638	1.643.115	1,95	2,25
13. Langkat	906.565	970.433	1.013.849	1,37	1,88
14. Nias Selatan	1)	288.233	271.026	1)	1)
15. Humbang Hasundutan	1)	152.997	152.757	1)	1)
16. Pakpak Bharat	1)	34.542	34.882	1)	1)
17. Samosir	1)	131.073	130.662	1)	1)
18. Serdang Bedagai	1)	588.176	605.630	1)	1)
Kota					
19. Sibolga	82.310	88.717	91.941	1,51	1,86
20. Tanjung Balai	132.438	152.814	156.475	2,90	2,82
21. Pematang Siantar	241.524	230.487	235.372	-0,93	-0,43
22. Tebing Tinggi	125.006	135.671	137.959	1,65	1,66
23. Medan	1.905.587	2.036.185	2.067.288	1,33	1,37
24. Binjai	213.760	237.904	244.256	2,16	2,25
25. P. Sidempuan	1)	177.499	181.865	1)	1)
Sumatera Utara	11.513.973	12.326.678	12.643.494	1,37	1,57

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang dan Tapsel)

1.1.2. Struktur Umur dan Angka Beban Ketergantungan

Menurut Mantra, suatu daerah atau negara dikatakan berstruktur umur muda, apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), sedangkan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas kurang dari 3 persen. Sebaliknya suatu daerah atau negara dikatakan berstruktur umur tua, apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

Tabel 1.1.2. Komposisi Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kelompok Umur, 2002 – 2006 (%)

Kelompok Umur	2002	2004	2006
(1)	(2)	(2)	(3)
Anak-anak (0 -14)	34,16	33,72	31,96
Produktif (15 – 64)	62,11	62,57	64,11
Lansia (65 +)	3,73	3,71	3,93
TOTAL	100,00	100,00	100,00
Angka Beban Tanggungan (ABT)	61,00	59,72	55,98

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan diantaranya terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif (kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 atau lebih) yang berarti akan mengakibatkan semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Semakin kecil angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya. Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur pada tahun 2006, ternyata

penduduk Sumatera Utara tidak tergolong struktur umur muda dan juga tidak termasuk kelompok dengan struktur umur tua. Ini ditunjukkan dari persentase penduduk umur muda (dibawah 15 tahun) sebesar 31,96 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas (umur tua) sebesar 3,93 persen, dengan umur median sebesar 22 tahun. Walaupun demikian, komposisi umur penduduk tersebut mengarah ke struktur umur muda, ditandai dengan jumlah penduduk umur muda cukup besar. Hal ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga trampil, mandiri untuk mengisi dan menciptakan peluang-peluang ekonomi yang tersedia.

Bertambah besarnya proporsi penduduk usia produktif, secara langsung mengakibatkan rasio beban tanggungan menjadi turun. Penduduk usia produktif meningkat dari 62,57 per seratus penduduk pada tahun 2004 menjadi 64,11 pada tahun 2006. Pada tahun 2002 terdapat 61 orang yang berusia tidak produktif ditanggung setiap seratus penduduk usia produktif, tahun 2004 angka itu semakin membaik menjadi 60 dan pada tahun 2006 beban tanggungan itu terus turun menjadi 56,

Selanjutnya rasio beban ketergantungan bila dirinci menurut kabupaten/kota cukup bervariasi. Pada tahun 2006, rasio beban ketergantungan atau tanggungan tertinggi terdapat di Kabupaten Tapanuli Utara sebesar 76,46. Tingginya beban tanggungan ini diduga karena telah terjadi perpindahan penduduk usia produktif dengan tujuan bekerja atau melanjutkan sekolah ke daerah yang lebih berpotensi. Dengan rendahnya rasio ketergantungan penduduk di suatu wilayah akan memberikan peluang untuk melakukan investasi, antara lain melalui pendidikan dan kesehatan terhadap usia 0-14 tahun. Kota Medan memiliki rasio beban tanggungan yang paling kecil, yaitu 45,01. Tabel 1.1.3 secara rinci memperlihatkan rasio beban ketergantungan setiap kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Tabel 1.1.3. Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2002-2006 (%)

Kota/Kabupaten	2002	2004	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	74,19	71,50	61,45
2. Mandailing Natal	79,12	74,06	60,48
3. Tapanuli Selatan	71,70	78,32	67,20
4. Tapanuli Tengah	80,21	79,50	73,01
5. Tapanuli Utara	77,37	76,46	76,46,
6. Toba Samosir	82,05	69,89	69,46
7. Labuhan Batu	69,03	67,87	61,92
8. Asahan	65,84	53,35	60,59
9. Simalungun	55,86	58,78	56,03
10. Dairi	71,82	76,09	63,37
11. Karo	55,28	58,81	57,80
12. Deli Serdang	58,45	55,64	51,45
13. Langkat	54,04	54,46	51,95
14. Nias Selatan	1)	1)	71,23
15. Humbang Hasundutan	1)	1)	69,75
16. Pakpak Bharat	1)	1)	75,50
17. Samosir	1)	1)	64,42
18. Serdang Bedagai	1)	1)	51,26
19. Kota			
19. Sibolga	60,00	59,97	55,57
20. Tanjung Balai	62,00	62,05	56,65
21. Pematang Siantar	52,74	52,09	51,13
22. Tebing Tinggi	51,79	47,23	52,93
23. Medan	47,56	48,19	45,01
24. Binjai	50,83	46,20	48,39
25. P. Sidempuan	1)	56,62	57,43
Sumatera Utara	61,00	59,72	55,98

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang dan Tapsel)

1.1.3. Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin diatas 100,

artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut.

Jumlah penduduk Sumatera Utara pada tahun 2002 dan 2004 menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki dengan rasio jenis kelamin masing-masing 99,92 yakni setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,92 penduduk laki-laki. Pada tahun 2006 penduduk laki-laki di Sumatera Utara sedikit lebih banyak dari perempuan yaitu masing-masing 6.324.504 jiwa dan 6.318.990 jiwa. Dengan rasio jenis kelamin penduduk pada tahun 2006 sebesar 100,09 artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 100,09 penduduk laki-laki.

Dilihat berdasarkan per kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2006 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kabupaten Langkat, Kota Sibolga dan Kabupaten Labuhan Batu yaitu masing-masing 102,61; 102,43 dan 102,14. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah terdapat di Kabupaten Samosir, Toba Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu masing-masing 97,28; 97,28 dan 97,81.

Selengkapnya data rasio jenis kelamin menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara pada tahun 2006 dapat dilihat pada tabel 1.1.4

Tabel 1.1.4. Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2002-2006 (%)

Kota/Kabupaten	2002	2004	2006
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	98,89	98,89	99,04
2. Mandailing Natal	96,09	96,09	96,23
3. Tapanuli Selatan	97,66	97,66	97,81
4. Tapanuli Tengah	100,79	100,79	100,94
5. Tapanuli Utara	98,25	98,25	98,40
6. Toba Samosir	97,13	97,13	97,28
7. Labuhan Batu	101,98	101,98	102,14
8. Asahan	101,14	101,14	101,30
9. Simalungun	100,33	100,33	100,48
10. Dairi	99,27	99,27	99,42
11. Karo	99,03	99,03	99,18
12. Deli Serdang	101,15	101,14	101,30
13. Langkat	102,45	102,45	102,61
14. Nias Selatan	1)	98,15	98,30
15. Humbang Hasundutan	1)	98,10	98,25
16. Pakpak Bharat	1)	99,10	99,24
17. Samosir	1)	97,13	97,28
18. Serdang Bedagai	1)	101,14	101,30
Kota			
19. Sibolga	102,27	102,27	102,43
20. Tanjung Balai	100,76	100,76	100,91
21. Pematang Siantar	98,24	98,24	98,39
22. Tebing Tinggi	98,13	98,13	98,28
23. Medan	98,69	98,69	98,84
24. Binjai	100,42	100,42	100,57
25. P. Sidempuan	1)	99,10	99,25
Sumatera Utara	99,92	99,92	100,09

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : 1) Masih bergabung dengan Kabupaten induk (Nias, Taput, Dairi, Tobasa, Deli Serdang dan Tapsel)

1.1.4. Kepadatan Penduduk

Penyebaran penduduk antar daerah di Sumatera Utara tampak masih sangat timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing kabupaten/kota belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah yang sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan (perpindahan) migrasi. Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kota Sibolga yang berada di pantai barat Sumatera Utara, luasnya hanya 0,02 persen dari luas daratan Sumatera Utara merupakan kota terpadat di Sumatera Utara, dengan kepadatan sekitar 8.537 jiwa setiap kilometer persegi. Selanjutnya, Kota Medan sebagai ibu kota Propinsi Sumatera Utara yang luasnya 265,10 Km² atau 0,37 persen dari luas daratan Sumatera Utara setiap kilometer persegi ditempati 7.798 jiwa. Sekitar 16,35 persen penduduk Sumatera Utara berada di Kota Medan pada tahun 2006. Kota Pematang Siantar sebagai kota perdagangan terbesar kedua setelah Kota Medan, merupakan kota terpadat ketiga, dimana sekitar 2.943 jiwa penduduk menempati setiap kilometer persegi wilayah kota tersebut.

Sebaliknya gambaran tingkat kepadatan penduduk rendah tersebar di wilayah kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara. Kabupaten Pakpak Bharat yang dimekarkan dari Kabupaten Dairi hanya dihuni sekitar 29 jiwa

per Km² . Selanjutnya Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan kabupaten terluas wilayah daratannya (16,97 persen dari luas wilayah Sumatera Utara) hanya dihuni sekitar 52 jiwa penduduk setiap kilometernya. Kabupaten Deli Serdang yang wilayahnya berbatas dengan Kota Medan merupakan kabupaten terpadat diantara kabupaten-kabupaten lainnya di Sumatera Utara, yaitu 679 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 1.1.5. Kepadatan Penduduk Provinsi Sumatera Utara menurut Kabupaten/Kota, 2006

Kota/Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)	Luas Area (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²) Kol (2) : (3)
(1)	(2)	(3)	(4)
Kabupaten			
1. Nias	442.019	3.495,39	126
2. Mandailing Natal	413.750	6.620,70	63
3. Tapanuli Selatan	629.212	12.163,65	52
4. Tapanuli Tengah	297.843	2.158,00	136
5. Tapanuli Utara	256.444	3.764,65	69
6. Toba Samosir	169.116	2.352,35	68
7. Labuhan Batu	987.157	9.223,18	107
8. Asahan	1.038.554	4.580,75	227
9. Simalungun	841.198	4.368,60	192
10. Dairi	267.629	1.927,80	139
11. Karo	342.555	2.127,25	161
12. Deli Serdang	1.643.115	2.486,14	679
13. Langkat	1.013.849	6.263,29	162
14. Nias Selatan	271.026	1.625,91	148
15. Humbang Hasundutan	152.757	2.297,20	65
16. Pakpak Bharat	34.882	1.218,30	29
17. Samosir	130.662	2.433,50	63
18. Serdang Bedagai	605.630	1.913,33	304
Kota			
19. Sibolga	91.941	10,77	8.537
20. Tanjung Balai	156.475	61,52	2.586
21. Pematang Siantar	235.372	79,97	2.943
22. Tebing Tinggi	137.959	38,44	3.631
23. Medan	2.067.288	265,10	7.798
24. Binjai	244.256	90,24	2.704
25. P. Sidempuan	181.865	114,65	1.299
Sumatera Utara	12.643.494	71.680,68	176

Sumber : Sumatera Utara dalam Angka, BPS Provinsi Sumatera Utara

1.2 PENDIDIKAN

Upaya pembangunan dibidang pendidikan bertujuan untuk peningkatan sumber daya manusia. Pendidikan mempunyai peranan penting bagi suatu bangsa dan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Kualitas sumber daya manusia antara lain sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pentingnya pendidikan tercermin dalam UUD'45 dan GBHN, yang mengatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian program pendidikan mempunyai andil besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya untuk menyediakan sarana wajib belajar 6 tahun yang dicanangkan pada tahun 1984 menjadi wajib belajar 9 tahun yang dimulai tahun 1994. Diharapkan dengan demikian tingkat pendidikan penduduknya akan lebih baik dan jumlah penduduk yang buta huruf akan berkurang terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

Keadaan pendidikan penduduk secara umum dapat diketahui dari beberapa indikator seperti angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan yang ditamatkan, dan angka melek huruf.

1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah merupakan indikator penting dalam pendidikan yang menunjukkan persentase penduduk usia 7-12 tahun yang masih terlibat dalam sistem persekolahan. Adakalanya penduduk usia 7-12 tahun belum sama sekali menikmati pendidikan, tetapi ada sebagian kecil dari kelompok mereka yang sudah menyelesaikan jenjang pendidikan setingkat Sekolah Dasar.

Tabel 1.2.1. Angka Partisipasi Sekolah menurut Usia Sekolah Provinsi Sumatera Utara, 2005 - 2006

Usia Sekolah	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	2005	2006	2005	2006	2005	2006
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7 – 12	98.06	97.86	98.02	98.53	98.04	98.19
13 – 15	90.47	91.12	90.64	90.12	90.55	90.62
16 – 18	63.94	62.93	67.66	67.43	65.77	65.09
19 – 24	13.36	12.80	12.86	13.68	13.12	13.22

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya perkembangan partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun di tingkat provinsi memperlihatkan peningkatan dari 98.04 persen pada tahun 2005 menjadi 98.19 persen pada tahun 2006. Angka partisipasi sekolah penduduk laki-laki usia 7-12 tahun mengalami penurunan dibanding tahun 2005. Jika dilihat secara keseluruhan kelompok umur sekolah (7-24 tahun) Angka Partisipasi Sekolah masih sangat kecil yaitu sekitar 66.62.

1.2.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Rendahnya tingkat pendidikan dapat dirasakan sebagai penghambat dalam pembangunan. Dengan demikian, tingkat pendidikan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Keadaan seperti ini sesuai dengan hakekat pendidikan itu sendiri, yakni merupakan usaha sadar untuk pengembangan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

Tabel 1.2.2. Persentase Penduduk 10 Ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 2006

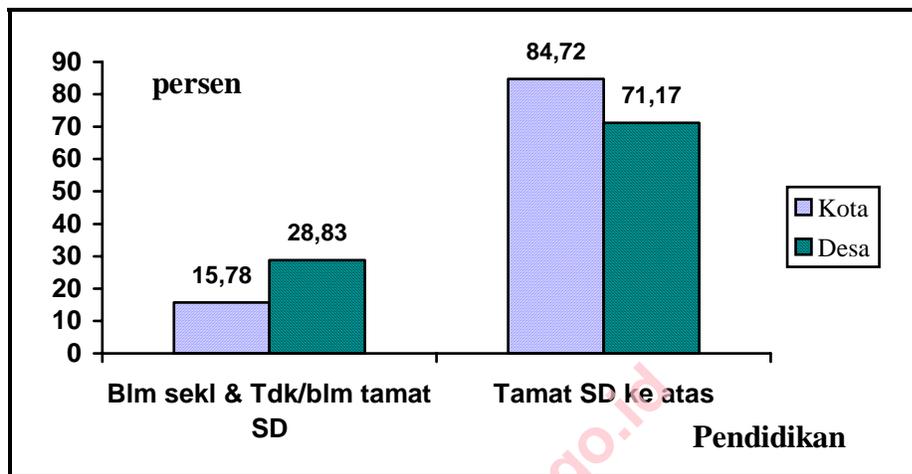
Kota/Kabupaten	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Tidak/ Belum Tamat SD	Pendidikan Yang Ditamatkan						
			SD	SLTP	SLTA	SLTA Kej	D1/ D2	D 3	D4/ S1
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1. Nias	8.57	29.92	31.83	17.89	9.00	1.28	0.73	0.00	0.78
2. Mandailing Natal	0.78	21.47	41.91	19.16	13.56	1.83	0.36	0.00	0.93
3. Tapanuli Selatan	0.21	20.18	32.82	27.59	16.50	1.87	0.38	0.00	0.46
4. Tapanuli Tengah	4.80	27.85	26.66	19.89	13.91	3.11	0.99	0.00	2.79
5. Tapanuli Utara	1.70	21.54	25.39	24.00	17.69	5.55	1.16	0.00	2.96
6. Toba Samosir	1.54	18.29	20.38	23.14	26.58	6.18	0.91	0.00	3.00
7. Labuhan Batu	1.16	21.91	30.82	22.37	18.27	3.97	0.51	0.00	1.01
8. Asahan	3.17	29.60	29.24	20.42	10.74	4.72	0.45	0.00	1.66
9. Simalungun	3.46	23.53	27.63	22.35	15.67	4.98	0.72	0.00	1.67
10. Dairi	1.52	22.20	31.98	25.05	14.16	2.96	0.59	0.00	1.54
11. Karo	1.50	21.81	27.81	21.17	20.43	3.84	0.72	0.00	2.72
12. Deli Serdang	1.86	19.95	24.06	22.96	20.50	7.46	0.65	0.00	2.56
13. Langkat	3.33	24.11	31.28	20.82	12.66	4.89	0.80	0.00	2.11
14. Nias Selatan	33.31	27.00	23.31	10.98	4.87	0.17	0.21	0.00	0.15
15. HumbHasundutan	2.47	19.95	25.87	28.48	18.44	3.90	0.18	0.00	0.71
16. Pakpak Barat	1.55	24.67	29.37	24.24	14.13	4.08	0.84	0.00	1.12
17. Samosir	2.74	17.80	20.46	23.58	28.06	5.69	0.26	0.00	1.40
18. Serdang Bedagai	8.57	29.92	31.83	17.89	9.00	1.28	0.73	0.00	0.78
Kota									
19. Sibolga	0.62	16.60	21.44	25.60	27.89	4.45	0.48	0.00	2.92
20. Tanjung Balai	1.12	17.51	32.66	21.63	18.95	4.76	0.84	0.00	2.53
21. Pematang Siantar	1.02	11.38	20.25	23.13	27.26	10.36	1.44	0.00	5.16
22. Tebing Tinggi	1.38	12.49	27.65	25.13	21.05	7.89	0.52	0.00	3.90
23. Medan	0.88	10.20	19.04	21.18	30.67	7.59	1.08	0.00	9.35
24. Binjai	0.54	12.14	24.00	22.58	28.72	5.87	0.95	0.00	5.20
25. P. Sidempuan	0.79	15.64	24.59	20.99	24.83	5.04	1.01	0.00	7.13
Sumatera Utara	2.70	20.26	26.98	21.84	19.11	5.19	0.72	0.00	3.21
• Perkotaan	1.24	14.54	22.15	22.32	25.92	7.05	0.97	0.00	5.82
• Pedesaan	3.90	24.93	30.92	21.46	13.54	3.67	0.51	0.00	1.07

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berhasil menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi

sekitar 77.05 persen, selebihnya sekitar 22.95 persen adalah mereka yang berpendidikan dibawah SD.

Gambar 1.2.1. : Persentase Penduduk menurut Pendidikan dan Tipe Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2006



1.2.3 Angka Buta Huruf

Salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial yang merata adalah dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Tingkat melek huruf atau sebaliknya tingkat buta huruf dapat dijadikan ukuran kemajuan suatu bangsa. Adapun kemampuan membaca dan menulis yang dimiliki akan dapat mendorong penduduk untuk berperan lebih aktif dalam proses pembangunan.

Tabel 1.2.3 menunjukkan persentase penduduk yang buta huruf menurut kabupaten/kota. Kabupaten Nias Selatan mempunyai persentase penduduk yang buta huruf mencapai angka 32.40 persen. Tingginya angka buta huruf di Kabupaten Nias Selatan antara lain disebabkan oleh sarana transportasi dan komunikasi yang terbatas, baik menuju ke daerah tersebut maupun antar daerah di Nias Selatan.

Tabel 1.2.3. Angka Melek Huruf Penduduk 10 Tahun Ke Atas menurut Kabupaten/Kota, 2006

Kota/Kabupaten	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan	
	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf	Melek Huruf	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten						
1. Nias	94,92	5,08	87,31	12,69	90,99	9,01
2. Mandailing Natal	99,37	0,63	99,39	0,61	99,39	0,62
3. Tapanuli Selatan	99,83	0,16	99,74	0,26	99,79	0,21
4. Tapanuli Tengah	97,45	2,54	92,67	7,33	95,06	4,94
5. Tapanuli Utara	99,28	0,72	95,64	4,35	97,45	2,55
6. Toba Samosir	99,21	0,78	97,19	2,81	98,20	1,80
7. Labuhan Batu	99,24	0,77	97,90	2,10	98,58	1,43
8. Asahan	98,12	1,88	94,29	5,71	96,19	3,81
9. Simalungun	98,41	1,59	94,75	5,25	96,58	3,42
10. Dairi	99,14	0,86	97,07	2,93	98,14	1,87
11. Karo	99,07	0,93	96,47	3,53	97,72	2,28
12. Deli Serdang	98,53	1,47	96,84	3,16	97,69	2,31
13. Langkat	98,33	1,67	94,79	5,21	96,55	3,45
14. Nias Selatan	72,25	27,74	60,92	39,08	66,60	33,40
15. Humb.Hasundutan	98,21	1,79	95,39	4,62	96,81	3,19
16. Pakpak Bharat	98,31	1,69	95,37	4,63	96,84	3,16
17. Samosir	98,12	1,88	95,34	4,66	96,71	3,29
18. Serdang Bedagai	98,79	1,21	94,52	5,48	96,65	3,36
Kota						
19. Sibolga	99,34	0,67	98,26	1,73	98,80	1,20
20. Tanjung Balai	99,44	0,57	98,62	1,38	99,02	0,97
21. Pematang Siantar	99,15	0,85	97,98	2,01	98,56	1,44
22. Tebing Tinggi	99,91	0,09	97,21	2,79	98,57	1,43
23. Medan	99,48	0,52	98,71	1,29	99,09	0,91
24. Binjai	99,52	0,48	99,04	0,96	99,28	0,72
25. P. Sidempuan	99,61	0,38	98,62	1,38	99,10	0,89
Sumatera Utara	98,24	1,76	95,77	4,23	97,00	3,00
• Perkotaan	99,23	0,77	97,93	2,07	98,58	1,43
• Pedesaan	97,44	2,55	93,99	6,01	95,72	4,29

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

1.3 KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh Pemerintah, seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

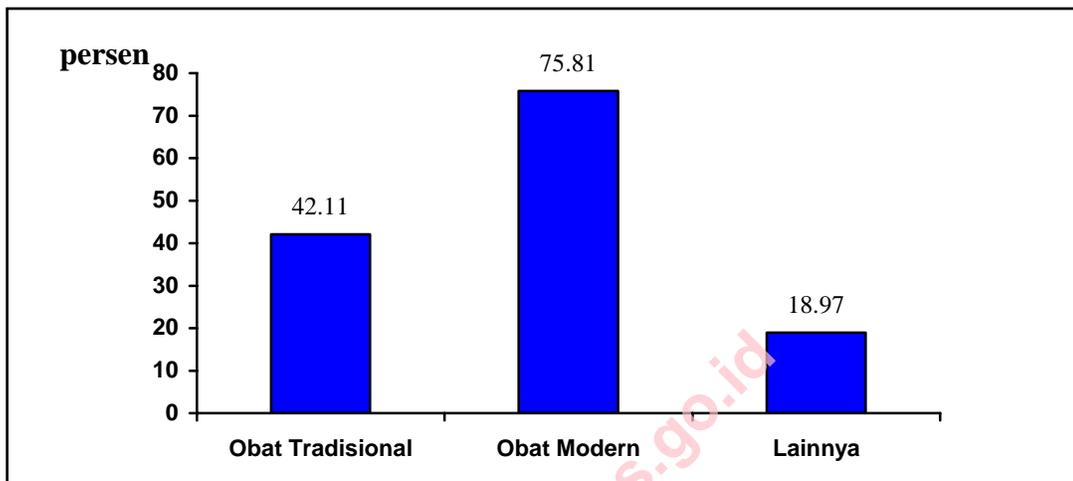
Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat diantaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.

1.3.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate)

Gambar 1.3.1. menunjukkan persentase penduduk yang mengobati sendiri selama sebulan yang lalu. Persentase penduduk yang melakukan pengobatan sendiri dengan cara memakai obat tradisional

sebesar 42,11 persen, dengan cara memakai obat modern sebesar 75,81 persen dan dengan cara lainnya 18,97 persen.

Gambar 1.3.1.: Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri dengan Cara Pengobatannya Provinsi Sumatera Utara, 2006



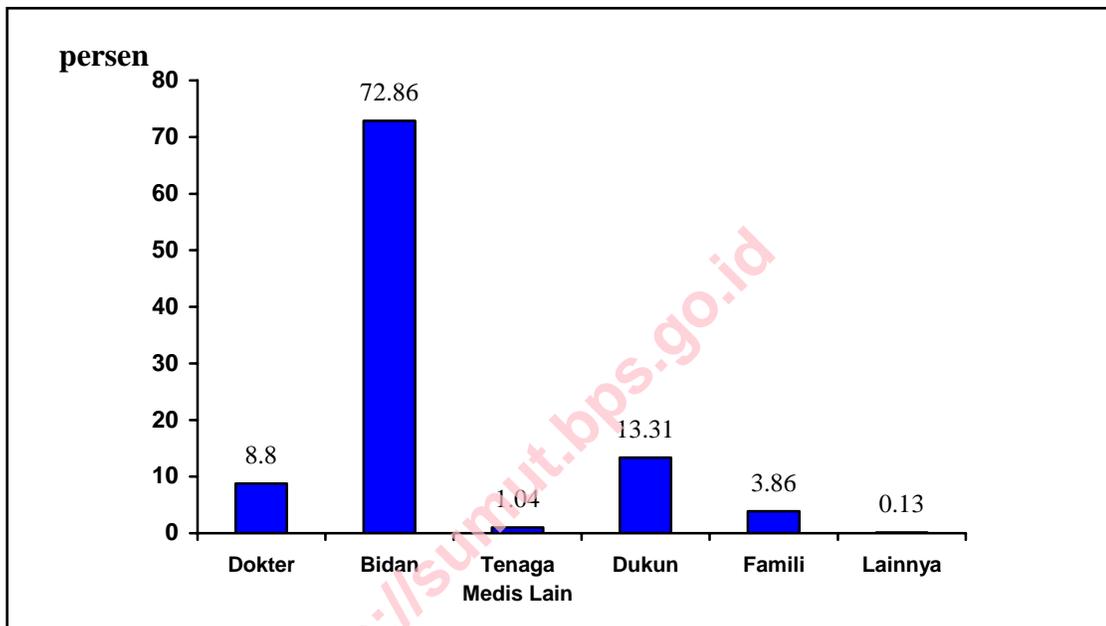
1.3.2. Penolong Kelahiran

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengetahui keadaan kesehatan suatu daerah adalah rasio antara penduduk dengan tenaga medis. Untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka sarana kesehatan semakin meningkat dari tahun ke tahun, dimana peranan pihak swasta sangat membantu, disamping karena kemajuan dalam bidang pendidikan telah menambah tenaga medis dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan.

Kesehatan balita selain dipengaruhi oleh kesehatan ibu, dapat juga dipengaruhi oleh faktor lain, diantaranya adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dibanding dengan yang ditolong oleh dukun, famili atau lainnya.

Pada Gambar 1.3.2. diketahui bahwa penolong kelahiran balita yang terbanyak adalah bidan (72,86 persen). Selanjutnya oleh dukun (13,31 persen), dokter (8,80 persen), famili (4,32 persen), tenaga medis (1,04 persen) dan lainnya (0,13 persen).

Gambar 1.3.2.: Persentase Penolong Persalinan Bayi Provinsi Sumatera Utara, 2006

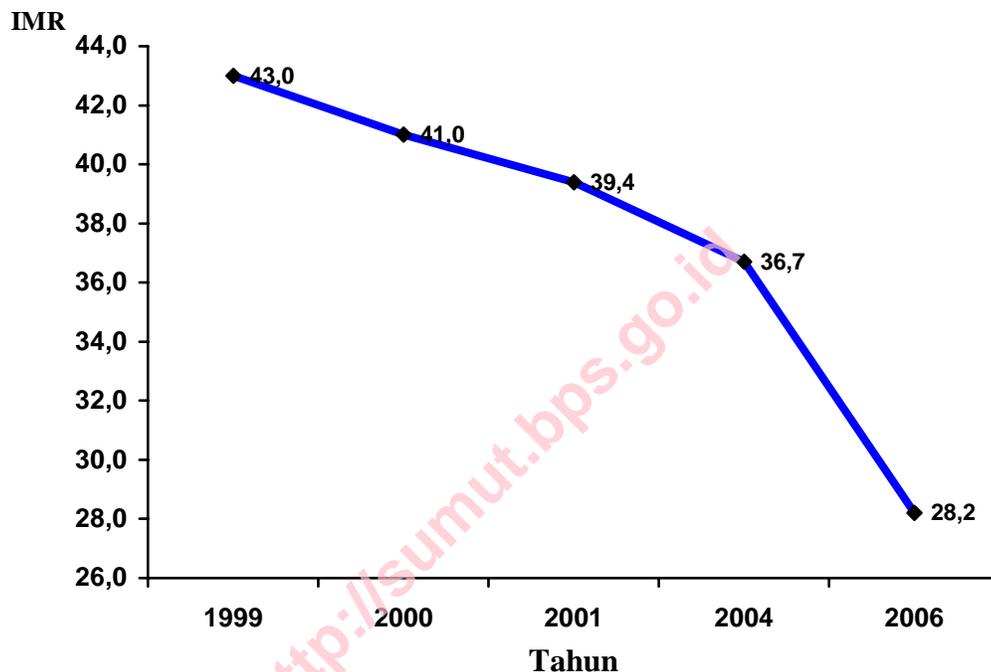


1.3.3. Angka Kematian Bayi (IMR)

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate / IMR*) dapat menggambarkan tingkat kesehatan penduduk secara umum. Angka ini biasanya diperkirakan melalui cara atau metode tertentu dari data hasil sensus/survei. Kematian bayi berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi keluarga, sistem nilai adat istiadat, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan yang tersedia. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan kesehatan dimasa mendatang perlu terus ditingkatkan. Dengan pembangunan yang dilaksanakan tersebut, baik pembangunan sarana kesehatan maupun perbaikan tingkat hidup penduduk juga akan menyebabkan penurunan tingkat kematian.

IMR di Sumatera Utara selama periode 1999-2006 terus mengalami penurunan. Pada tahun 1999, IMR diperkirakan sebesar 43, dan terus menurun menjadi 41 pada tahun 2000 dan tahun 2006 menurun lagi menjadi 28,20.

Gambar 1.3.3.: Kecenderungan IMR Provinsi Sumatera Utara, 1999-2006

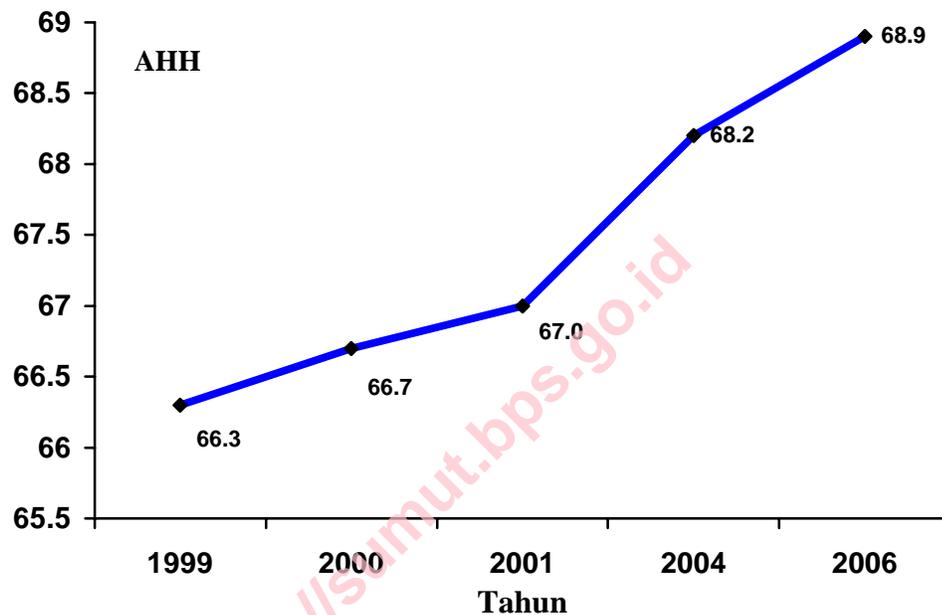


1.3.4. Angka Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang angka harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial

ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia. Sejalan dengan penurunan IMR, maka AHH menunjukkan peningkatan (Gambar 1.3.4.).

Gambar 1.3.4.: Kecenderungan Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara, 1999-2006



Kecenderungan meningkatnya angka harapan hidup ini disebabkan membaiknya pelayanan kesehatan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi, sehingga memungkinkan terjadinya perbaikan gizi serta kesehatan dan lingkungan hidup yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan angka harapan hidup.

1.4 KETENAGAKERJAAN

Angkatan kerja dalam konsep ketenagakerjaan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja atau mencari pekerjaan dalam periode seminggu yang lalu. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia umumnya dan di Provinsi Sumatera Utara pada khususnya, dalam masa sekarang ini diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat dari penambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus bertambah, masih banyaknya pengangguran terbuka maupun terselubung (*disguised unemployed*) atau bekerja kurang (*under employed*) sebagai akibat dari budaya bercorak agraris. Lapangan pekerjaan yang sangat terbatas karena situasi perekonomian yang belum membaik serta semakin menumpuknya pengangguran terdidik sebagai konsekuensi dari peningkatan taraf pendidikan masyarakat dan pemutusan hubungan kerja sebagai akibat banyaknya perusahaan yang tutup menambah permasalahan ketenaga kerjaan di daerah ini.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara, maka dalam bab ini diulas secara singkat keadaan ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*TPAK*). Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi antara lain, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, dan jenis pekerjaan serta jam kerja. Penduduk usia kerja (*berusia 15 tahun ke atas*) digolongkan sebagai: (i) angkatan kerja, bila mereka bekerja atau mencari pekerjaan, dan (ii) bukan angkatan kerja, bila mereka bersekolah, mengurus rumahtangga, dan lainnya.

1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (*TPAK*)

Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomis berpotensi menghasilkan output atau pendapatan,

baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan. Semakin tinggi TPAK, berarti semakin besar pula keterlibatan penduduk usia kerja dalam pasar kerja.

Tabel 1.4.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Angka Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara, 2006

Wilayah/ Jenis Kelamin	Partisipasi Angkatan Kerja	Angka Pengangguran Terbuka
(1)	(2)	(3)
Perkotaan	64,67	17,75
Pedesaan	72,48	11,28
Perkotaan + Pedesaan	68,90	14,06
Laki-laki	84,09	10,29
Perempuan	53,86	19,89
Laki-laki + Perempuan	68,90	14,06

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

TPAK Sumatera Utara penduduk usia minimal 15 tahun pada tahun 2006 sebesar 68,90 persen, dengan rincian 85,94 persen bekerja dan 14,06 persen mencari pekerjaan. Menurut daerah tempat tinggal, TPAK daerah perkotaan (64,67 persen) lebih rendah dari pedesaan (72,48 persen). Dilihat dari perbedaan jenis kelamin, maka TPAK laki-laki (84,09 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan (53,86 persen). Hal ini terutama disebabkan besarnya persentase penduduk perempuan yang mengurus rumah tangga, sementara penduduk laki-laki umumnya merupakan pencari nafkah utama di dalam keluarga (Tabel 1.4.1.).

TPAK perempuan yang masih rendah, diduga mempunyai potensi untuk meningkat tajam di masa depan. Kehidupan modern dengan

berbagai kemudahannya dan tingkat pendidikan yang meningkat akan dapat merubah fungsi perempuan tidak hanya terbatas di rumahtangga, tetapi juga layak bekerja dan mempunyai karir.

Jika dilihat angka pengangguran terbuka penduduk usia minimal 15 tahun ada sekitar 14,06 persen dengan rincian 17,75 persen untuk daerah perkotaan dan 11,28 persen untuk daerah pedesaan. Tingkat pengangguran terbuka perempuan (19,89 persen) lebih tinggi dari pada tingkat pengangguran laki-laki (10,29 persen).

Dilihat dari kelompok umur partisipasi angkatan kerja didominasi kelompok usia produktif sebesar 70,22 persen. Dengan melihat komposisi umur dapat dianggap wajar karena pada usia produktif diharapkan mampu menanggung beban kelompok usia tidak produktif. Namun jika dilihat kelompok usia anak-anak (usia 10-14 tahun) menunjukkan masih adanya pekerja anak (11,73 persen).

Tabel 1.4.2. Partisipasi Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur Provinsi Sumatera Utara, 2006

Kelompok Umur	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10 - 14	8,11	9,89	9,02	14,88	12,18	13,55	12,22	11,24	11,73
15 - 64	83,74	48,59	66,11	87,03	60,49	73,74	85,52	55,00	70,22
65 +	44,57	29,64	36,60	66,42	40,70	52,86	57,42	36,07	46,10

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Sumatera Utara

1.4.2. Lapangan Pekerjaan

Untuk memudahkan analisis sektor perekonomian, maka lapangan pekerjaan utama yang terdiri dari sembilan sektor dibagi dalam tiga kelompok utama, yaitu sektor A (Pertanian), sektor M (Pertambangan/penggalan, Industri, Listrik Gas dan Air serta Bangunan), serta sektor S (Angkutan, Perdagangan, Keuangan dan Jasa) atau ketiganya biasa disebut sebagai sektor Primer, sektor Sekunder dan sektor Tertier.

Tabel 1.4.3. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Lapangan Usaha Provinsi Sumatera Utara, 2006 (%)

Lapangan Usaha/ Sektor Perekonomian	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pertanian (A)	16,49	12,31	15,09	74,83	74,75	74,80	49,60	51,25	50,20
2. Industri (M)	24,23	13,51	20,64	7,97	5,11	6,86	15,00	8,27	12,54
• Pertambangan/ Penggalan	0,51	0,24	0,42	0,51	0,21	0,40	0,51	0,22	0,41
• Industri	12,53	12,43	12,50	3,46	4,67	3,93	7,38	7,59	7,46
• Listrik, Gas dan Air	0,62	0,21	0,48	0,16	0,11	0,14	0,36	0,15	0,28
• Konstruksi	10,57	0,63	7,24	3,84	0,12	2,39	6,75	0,31	4,39
3. Jasa (S)	59,28	74,18	64,27	17,20	20,13	18,34	35,39	40,49	37,25
• Perdagangan	24,83	42,12	30,62	6,63	11,55	8,54	14,50	23,06	17,63
• Angkutan dan komunikasi	14,38	1,49	10,06	4,99	0,29	3,17	9,05	0,74	6,01
• Keuangan	3,17	1,62	2,65	0,41	0,11	0,30	1,60	0,68	1,26
• Jasa Kemasyarakatan	16,86	28,95	20,91	5,11	8,11	6,27	10,19	15,96	12,30
• Lainnya	0,04	0,00	0,03	0,06	0,07	0,06	0,05	0,05	0,05

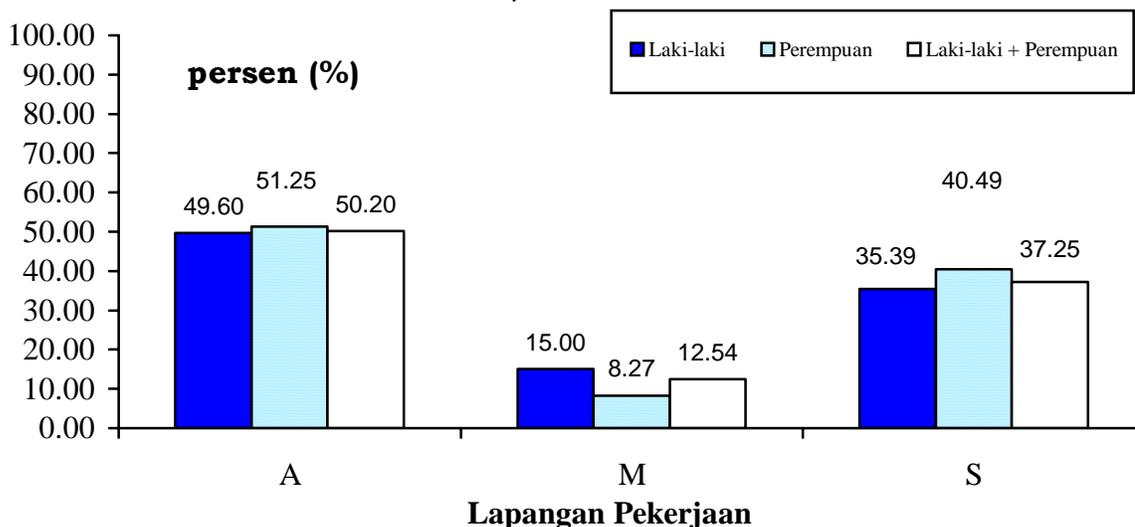
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Sumatera Utara

Struktur lapangan pekerjaan pada penduduk usia minimal 15 tahun di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa sektor Pertanian

merupakan lapangan pekerjaan yang paling menonjol. Ada sekitar 50,20 persen penduduk daerah ini bekerja di sektor A, dan sisanya tertampung di sektor M (12,54 persen) dan sektor S (37,25 persen).

Untuk penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, bila diamati menurut jenis kelamin, maka sektor Pertanian (A) umumnya didominasi oleh para pekerja perempuan (51,25 persen) dibandingkan para pekerja laki-laki (49,60 persen). Sedang pada sektor Industri (M), ternyata pekerja laki-laki lebih dominan (15,00 persen) atau sekitar dua kali lipat dari pekerja perempuan (8,27 persen). Pada sektor Jasa (S), nampak bahwa persentase pekerja laki-laki (35,39 persen) dan perempuan (40,49 persen) relatif sebanding, walaupun pekerja perempuan lebih tinggi. Namun bila diamati lebih rinci secara sektoral dalam kelompok sektor Jasa, maka pada sektor Perdagangan pekerja perempuan (23,06 persen) lebih dominan dibandingkan laki-laki (14,50 persen). Jika diamati menurut tipe daerah, maka pekerja di daerah perkotaan yang mengandalkan hidupnya dari sektor Pertanian (A) hanya sebesar 15,09 persen, sedangkan di daerah pedesaan mencapai 74,80 persen (Tabel 1.4.3)

Gambar 1.4.1.: Persentase Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja menurut Sektor A,M,S dan Tipe Daerah Provinsi Sumatera Utara, 2006



1.4.3. Status Pekerjaan

Status Pekerjaan dibedakan menjadi enam macam status pekerjaan, yaitu usaha sendiri tanpa bantuan orang lain, usaha dengan dibantu anggota rumahtangga/buruh tidak tetap, berusaha dibantu dengan buruh tetap, buruh/karyawan pemerintah dan swasta, serta pekerja keluarga. Klasifikasi status pekerjaan ini bermanfaat terutama untuk membandingkan proporsi penduduk yang bekerja sebagai buruh atau pekerja, usaha sendiri dengan yang menjadi pekerja keluarga pada sektor tertentu.

Pada umumnya pekerja keluarga, pengusaha tanpa buruh dan pengusaha dengan bantuan pekerja keluarga lebih menonjol pada sektor dan jenis pekerja yang relatif 'tradisional', sedangkan sektor dan jenis yang relatif modern terdapat lebih banyak buruh atau karyawan dan pengusaha yang dengan buruh tetap. Pekerja keluarga biasanya mengelompok pada sektor-sektor pertanian, terutama di kalangan perempuan dan penduduk laki-laki berusia muda.

Data ketenagakerjaan menurut status pekerjaannya pada tahun 2006 disajikan pada Tabel 1.4.4. Penduduk Sumatera Utara sebagian besar bekerja sebagai buruh/karyawan baik pemerintah maupun swasta sebanyak 33,02 persen, dan yang paling sedikit adalah pekerja bebas di non pertanian (2,78 persen). Yang bekerja sebagai pekerja keluarga sebesar 17,71 persen, sebagai pengusaha sendiri 23,16 persen.

Tabel 1.4.4. Komposisi Penduduk 15 Tahun Ke Atas menurut Pekerjaan Provinsi Sumatera Utara, 2006 (%)

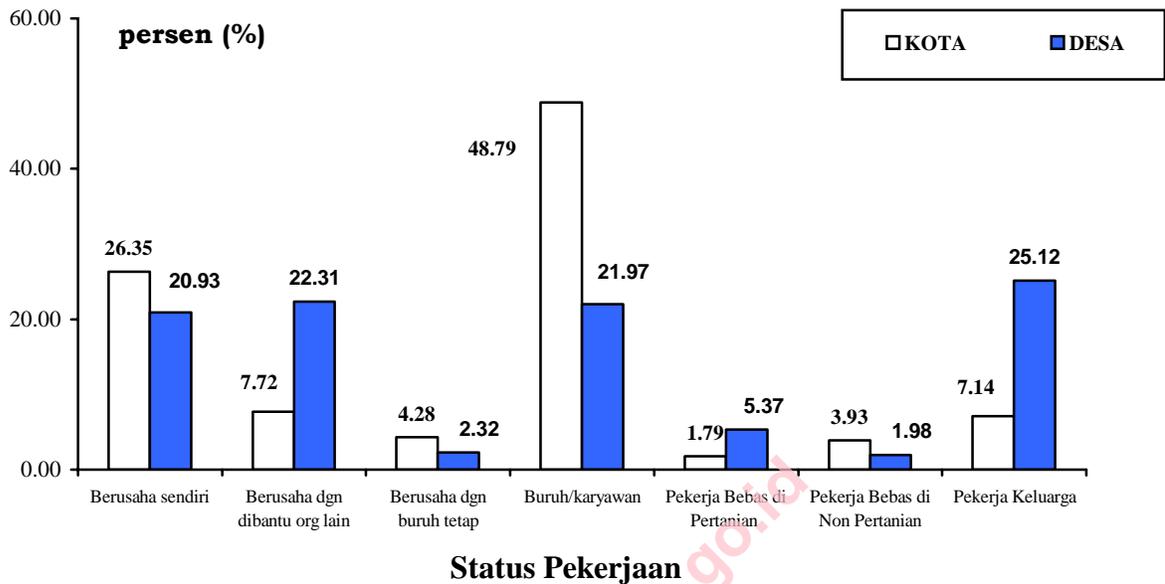
Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	24,59	20,70	23,16
Berusaha Sendiri Dibantu Orang Lain	18,84	11,92	16,30
Berusaha Dengan Buruh Tetap	4,04	1,54	3,13
Buruh/Karyawan	36,91	26,30	33,02
Pekerja Bebas di Pertanian	4,33	3,14	3,89
Pekerja Bebas di Non Pertanian	3,29	1,91	2,78
Pekerjaan Keluarga	8,01	34,49	17,71

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Sumatera Utara

Pola struktur pekerja antara laki-laki dan perempuan berbeda. Sebagian besar perempuan bekerja sebagai pekerja keluarga atau pekerja tak dibayar (34,49 persen) dan buruh/karyawan (26,30 persen). Untuk penduduk laki-laki sebagian besar sebagai buruh/karyawan (36,91 persen) dan berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sebanyak 24,59 persen.

Gambar 1.4.2 memperlihatkan status pekerjaan utama 15 tahun ke atas menurut daerah tempat tinggal. Ada perbedaan komposisi antara daerah perkotaan dengan pedesaan. Di daerah perkotaan status pekerjaan utama penduduk terbesar adalah sebagai buruh/karyawan (48,79 persen), sedangkan di daerah pedesaan adalah pekerja keluarga (25,12 persen). Hal ini wajar, karena daerah kota cenderung memiliki fasilitas lebih lengkap dibanding pedesaan. Disamping itu pada daerah perkotaan penyerapan tenaga kerja relatif tinggi.

Gambar 1.4.2 : Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja menurut Status Pekerjaan Provinsi Sumatera Utara, 2006



1.4.4. Jam Kerja

Jam kerja normal selama 35 jam seminggu sering dipakai sebagai patokan untuk mengelompokkan seorang pekerja, apakah ia termasuk pekerja penuh atau pekerja tidak penuh/sambilan. Orang dikatakan sebagai bekerja penuh (*full employed*) bila jam kerjanya mencapai 35 jam kerja atau lebih dalam seminggu (dengan mengikuti konsep bekerja minimal 1 jam berturut-turut). Sebaliknya dikatakan bekerja tidak penuh bila jam kerjanya kurang dari 35 jam dalam seminggu. Adapun penduduk dengan jam kerja 0 jam adalah penduduk yang termasuk kategori bekerja tetapi untuk sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab, seperti sakit, cuti untuk karyawan, sedang menunggu panen untuk petani dan mogok kerja.

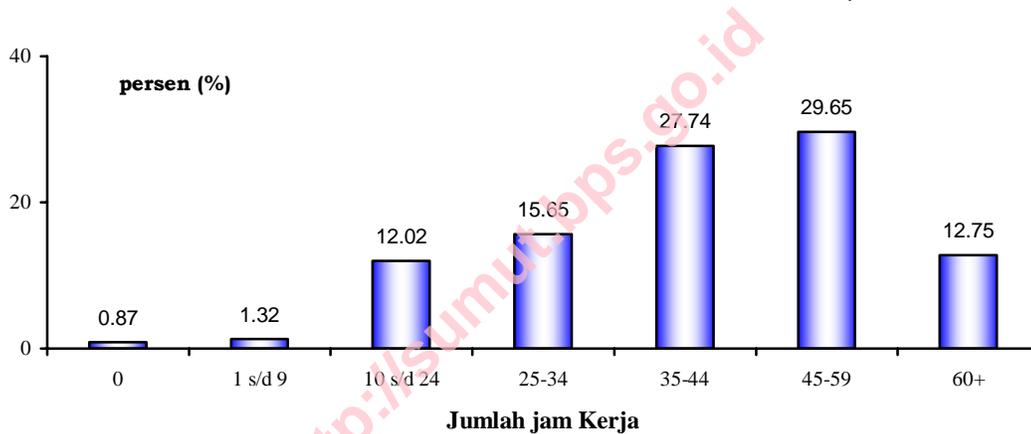
Tabel 1.4.5. Persentase Penduduk Yang Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Jam Kerja Seluruhnya Provinsi Sumatera Utara, 2006

Kabupaten/Kota	Jumlah Jam Kerja Seluruhnya (Jam)							Rata-rata Jam Kerja
	0	1-9	10-24	25-34	35-44	45-59	60 +	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kabupaten								
1. Nias	0,00	0,49	11,68	16,50	41,72	27,60	2,00	38,22
2. Mandailing Natal	1,45	1,21	9,33	27,63	30,32	26,71	3,34	38,74
3. Tapanuli Selatan	1,54	2,69	22,15	35,22	24,71	11,31	2,38	32,07
4. Tapanuli Tengah	2,40	1,57	18,52	21,47	23,16	17,48	15,40	39,71
5. Tapanuli Utara	0,15	1,84	17,81	28,48	34,73	13,10	3,90	35,03
6. Toba Samosir	0,89	0,47	14,00	20,84	36,59	19,32	7,88	38,68
7. Labuhan Batu	0,54	1,79	14,49	18,68	32,76	20,32	11,42	39,97
8. Asahan	1,14	2,59	17,23	13,99	22,90	27,94	14,42	40,97
9. Simalungun	1,52	1,11	17,07	19,62	33,12	22,34	5,22	37,32
10. Dairi	0,57	1,14	13,99	23,03	45,18	13,57	2,52	35,55
11. Karo	0,86	0,24	8,01	16,51	43,77	21,36	9,24	41,80
12. Deli Serdang	0,92	1,36	9,51	8,11	24,51	39,65	15,94	45,64
13. Langkat	0,58	1,50	11,95	16,69	23,20	29,54	16,54	43,19
14. Nias Selatan	0,06	0,31	12,27	18,51	35,53	30,94	2,38	38,15
15. Humbang Has	0,20	0,41	11,17	23,99	43,86	18,70	1,67	36,52
16. Pakpak Bharat	1,68	0,21	13,84	20,23	36,06	22,54	5,45	37,82
17. Samosir	0,00	1,57	13,74	18,46	47,17	14,80	4,26	36,71
18. Serdang Bedagai	1,22	2,07	14,96	12,36	26,09	31,30	12,00	41,29
Kota								
19. Sibolga	0,23	0,23	8,00	10,15	20,41	28,41	32,58	51,03
20. Tanjung Balai	2,59	1,44	8,75	10,91	18,17	33,61	24,55	48,24
21. Pematang Siantar	0,93	0,31	8,20	7,99	22,20	32,37	28,01	49,14
22. Tebing Tinggi	0,21	0,10	6,38	8,33	15,84	32,82	36,32	52,58
23. Medan	0,62	0,74	4,86	6,59	17,92	47,54	21,74	49,51
24. Binjai	0,22	0,86	6,16	7,91	22,49	42,94	19,42	47,71
25. P. Sidempuan	1,74	1,76	8,97	15,68	23,85	25,97	22,02	45,73
Sumatera Utara	0,87	1,32	12,02	15,65	27,74	29,65	12,75	42,11

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Rata-rata jam kerja yang digunakan oleh penduduk Sumatera Utara adalah 42,11 jam per minggu. Dengan melihat rata-rata jumlah jam kerja, daerah Kota relatif lebih tinggi dibandingkan daerah Kabupaten. Untuk daerah kota rata-rata jam kerja berkisar antara 45,73 sampai dengan 52,58 jam per minggu. Sedangkan daerah kabupaten rata-rata jumlah jam kerja berkisar antara 32,07 sampai dengan 45,64 jam per minggu.

Gambar 1.4.3.: Penduduk 15 Tahun Ke atas Yang Bekerja menurut Jumlah Jam Provinsi Sumatera Utara, 2006



Dengan melihat kelompok usia 10 –14 tahun dapat melihat keterlibatan pekerja anak. Pekerja anak ini sebagian besar bekerja di sektor pertanian, yaitu sebagai pekerja keluarga.

**Tabel 1.4.6. Persentase Pekerja Anak (10-14 Tahun)
Provinsi Sumatera Utara, 2006**

Lapangan Usaha/ Sektor Perekonomian	Perkotaan			Pedesaan			Perkotaan + Pedesaan		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pertanian (A)	28,91	53,11	39,11	90,08	82,64	86,90	82,20	78,93	80,80
2. Industri (M)	23,52	0,00	13,60	6,62	10,54	8,29	8,79	9,21	8,98
• Pertambangan/ Penggalian	12,48	0,00	7,22	0,94	1,09	1,00	2,43	0,95	1,80
• Industri	9,91	0,00	5,73	4,52	9,45	6,63	5,21	8,26	6,52
• Listrik, Gas dan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Konstruksi	1,13	0,00	0,65	1,16	0,00	0,66	1,15	0,00	0,66
3. Jasa (S)	47,56	46,88	47,28	3,30	6,83	4,81	9,00	11,86	10,22
• Perdagangan	34,37	29,16	32,18	2,72	3,63	3,11	6,80	6,84	6,82
• Angkutan dan komunikasi	3,28	0,00	1,90	0,41	0,21	0,32	0,78	0,18	0,52
• Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Jasa Kemasyarakatan	9,91	17,72	13,20	0,17	2,99	1,38	1,42	4,84	2,88
• Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

1.5 FERTILITAS DAN KELUARGA BERENCANA

Salah satu komponen utama kependudukan yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk adalah fertilitas. Fertilitas menyangkut banyaknya bayi atau anak lahir hidup yang dilahirkan oleh wanita atau sekelompok wanita. Banyaknya anak yang dilahirkan sangat erat kaitannya terhadap kesejahteraan rumahtangga. Semakin banyak jumlah anak, berarti semakin besar tanggungan kepala rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual anggota rumahtangganya. Bagi rumah tangga dengan kondisi ekonomi yang lemah, maka pembatasan jumlah anak merupakan salah satu cara bagi tercapainya keluarga yang sejahtera.

Dalam upaya melakukan pembatasan jumlah anak yang akan dilahirkan, maka penduduk wanita pada usia tertentu menjadi sasarannya. Usia tertentu yang dimaksudkan disini adalah usia antara 15-49 tahun. Hal ini disebabkan pada usia tersebut kemungkinan wanita melahirkan anak cukup besar. Wanita yang berada pada usia tersebut ini disebut wanita usia subur (*WUS*) dan pasangan usia subur (*PUS*) bagi yang berstatus kawin.

Selanjutnya usia wanita saat perkawinan pertama selain mempengaruhi fertilitas juga mempunyai resiko dalam melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama, semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak karena belum matangnya rahim wanita muda untuk memproduksi anak, atau karena belum siapnya mental menghadapi masa kehamilan/kelahiran. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama, semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan/melahirkan.

1.5.1. Usia Perkawinan Pertama

Perkawinan merupakan komponen yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu unsur pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan, pertama yang menunjukkan perubahan status dari belum kawin ke status kawin. Kedua, kawin kembali, yaitu perubahan dari status cerai menjadi status kawin kembali. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, definisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan berulang kali sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya mempunyai anak.

Selanjutnya Tabel 1.5.1. menampilkan persentase wanita 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut umur perkawinan pertama. Secara umum, sebagian besar (modus) usia saat perkawinan pertama adalah 19-24 tahun (58,38 persen). Adapun persentase wanita pernah kawin yang usia perkawinan pertamanya kurang dari 17 tahun lebih sedikit yaitu mencapai 7,54 persen.

Tabel 1.5.1. Persentase Wanita Berusia 10 Tahun Ke Atas Yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Provinsi Sumatera Utara, 2006

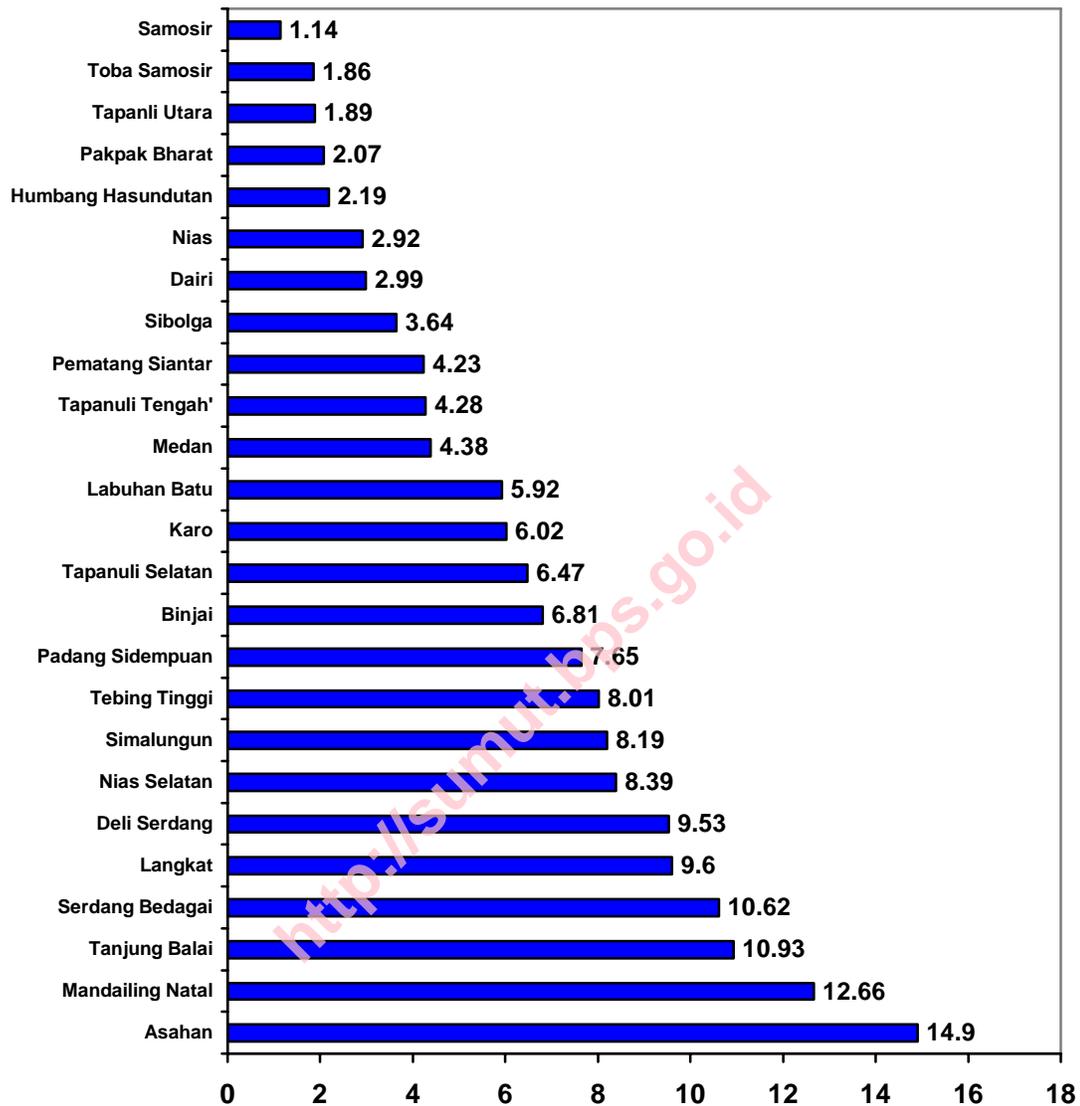
Usia Perkawinan Pertama	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
10 – 16	6,76	8,17	7,54
17 – 18	15,03	18,78	17,12
19 – 24	57,85	58,80	58,38
25 – 34	19,59	13,67	16,28
35 +	0,78	0,59	0,67

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Dengan melihat daerah perkotaan dan pedesaan terlihat bahwa perkawinan dalam usia muda lebih banyak terjadi di daerah pedesaan dibandingkan di daerah perkotaan. Menurut daerah kabupaten/kota terlihat bahwa persentase wanita yang pernah kawin pada usia muda (kurang dari 17 tahun) cukup bervariasi, dengan persentase terendah di Kabupaten Samosir (1,14 persen) dan yang tertinggi di Kabupaten Asahan (14,90 persen). Urutan perkawinan di bawah usia 17 tahun menurut daerah kabupaten/kota ditampilkan pada Gambar 1.5.1.

Untuk daerah Kota, yang mempunyai persentase perempuan dengan usia kawin pertama dibawah 17 tahun tertinggi adalah Kota Tanjung Balai (10,93 persen) dan terendah berada di Kota Sibolga (3,64 persen).

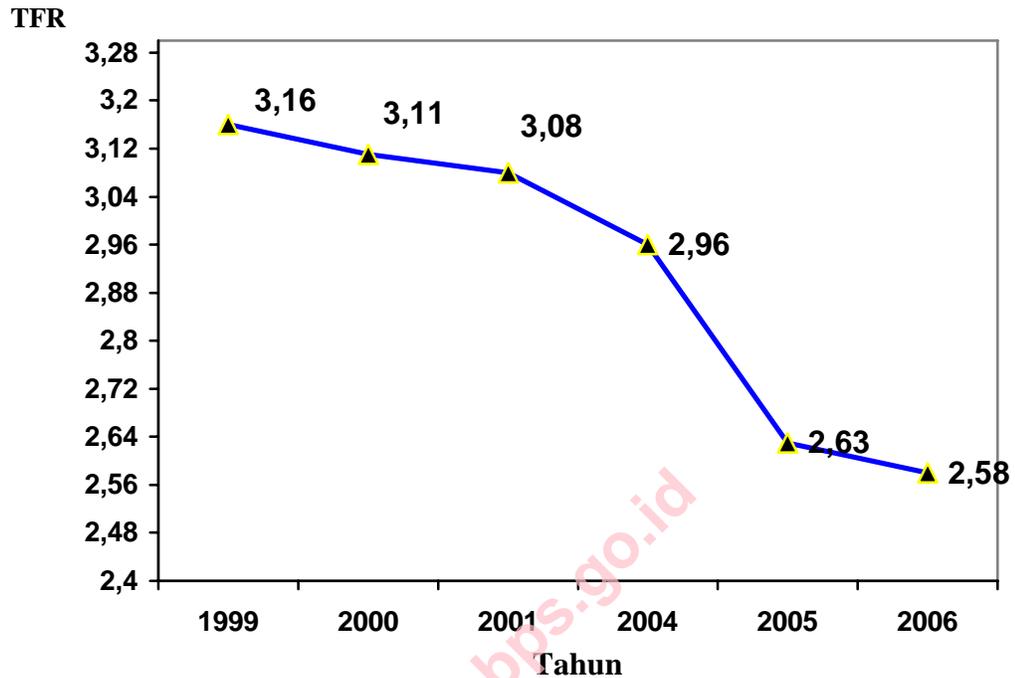
Gambar 1.5.1. Persentase Perempuan Dengan Usia Kawin Pertama di bawah 17 Tahun menurut Kabupaten/Kota, 2006



1.5.2. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/ TFR)

TFR adalah angka yang menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh sekelompok wanita sampai akhir masa reproduksinya dengan asumsi wanita-wanita tersebut mengikuti pola kelahiran pada saat perhitungan.

Gambar 1.5.2. Perkembangan Tingkat Fertilitas (TFR) Provinsi Sumatera Utara, 1999 - 2006



Dilihat dari angka TFR pada tahun 2004 sebesar 2,96 dan turun menjadi 2,58 pada tahun 2006. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat fertilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor yang berpengaruh langsung antara lain adalah pemakaian kontrasepsi dan umur pada saat perkawinan pertama. Sedang faktor yang tidak langsung adalah faktor sosial ekonomi seperti pendidikan, pengalaman bekerja dan lain-lain.

1.5.3. Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Menurut Golongan Umur dan Alat/Cara KB Yang Digunakan

Penurunan tingkat fertilitas di Provinsi Sumatra Utara telah berlangsung cukup lama, namun yang menarik untuk dibahas adalah perubahan yang terjadi setelah dimulainya program keluarga berencana nasional. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin lambat. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi

penurunan fertilitas. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami isteri yang hidup bersama dengan usia isterinya antara 15-49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, diadakan penelitian tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Jika dilihat Tabel 1.5.2. persentase wanita berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin, yang pernah menggunakan/memakai alat/cara KB adalah sebesar 45,08 persen, dengan rincian 46,38 persen di perkotaan dan 44,04 persen di pedesaan. Melihat keadaan daerah kabupaten/kota, proporsi wanita yang pernah ikut KB tersebut sangat bervariasi. Di Kabupaten Langkat sudah cukup tinggi yakni 58,07 persen, sedangkan di Kabupaten Mandailing Natal sangat rendah, yaitu hanya sebesar 15,43 persen.

Tabel 1.5.2. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin Yang Pernah dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Kabupaten/Kota, 2006

Kota/Kabupaten	Memakai Alat KB	
	Pernah	Sedang
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
1. Nias	16,78	25,44
2. Mandailing Natal	15,43	13,15
3. Tapanuli Selatan	32,80	22,38
4. Tapanuli Tengah	34,20	16,77
5. Tapanuli Utara	26,51	24,67
6. Toba Samosir	30,55	22,51
7. Labuhan Batu	49,70	21,43
8. Asahan	56,09	21,05
9. Simalungun	52,52	23,37
10. Dairi	36,63	20,37
11. Karo	53,77	25,12
12. Deli Serdang	50,25	27,33
13. Langkat	58,07	20,39
14. Nias Selatan	22,47	13,67
15. Humbang Hasundutan	17,96	14,05
16. Pakpak Bharat	21,43	19,44
17. Samosir	21,28	19,95
18. Serdang Bedagai	55,58	25,82
Kota		
19. Sibolga	46,13	26,93
20. Tanjung Balai	41,84	32,41
21. Pematang Siantar	41,25	29,00
22. Tebing Tinggi	56,01	23,13
23. Medan	43,34	25,18
24. Binjai	46,39	23,56
25. Padang Sidempuan	45,12	25,75
Sumatera Utara	45,08	23,23
Perkotaan	46,38	25,32
Pedesaan	44,04	21,56

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Persentase wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB adalah sebesar 23,23 persen. Dari proporsi wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB tersebut diantaranya menggunakan alat/cara suntik (45,90

persen), pil KB (34,46 persen) dan IUD/AKDR (4,44 persen). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai.

Tabel 1.5.3. Proporsi Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Kawin menurut Kabupaten/Kota dan Alat/Cara KB Yang Digunakan Provinsi Sumatera Utara, 2006

Kota/Kabupaten	MOW	MOP	IUD/ AKDR /Spiral	Suntik	Susuk KB	Pil KB	Kon- dom	Alat Moderan Lainnya	Tradisio nal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Kabupaten									
1. Nias	3,72	4,96	15,13	30,26	6,20	19,86	3,72	3,72	12,41
2. Mandailing Natal	1,60	2,82	1,41	82,88	2,82	4,23	2,82	0,00	1,41
3. Tapanuli Selatan	0,00	0,65	1,30	57,01	10,42	11,07	2,61	0,65	16,29
4. Tapanuli Tengah	1,39	1,39	4,90	46,15	10,50	27,99	2,79	0,00	4,88
5. Tapanuli Utara	10,89	0,99	2,97	52,48	14,85	8,91	1,98	0,00	6,93
6. Toba Samosir	7,07	2,52	6,06	48,10	12,38	15,03	0,88	0,88	7,07
7. Labuhan Batu	0,69	1,03	1,71	46,99	1,05	46,47	0,34	0,35	1,37
8. Asahan	7,13	2,94	2,58	41,11	1,60	41,75	0,96	0,00	1,94
9. Simalungun	10,24	1,54	7,22	46,32	3,38	26,74	0,75	0,75	3,06
10. Dairi	11,17	1,58	7,14	21,47	5,54	41,97	5,54	0,00	5,59
11. Karo	6,08	1,40	6,53	51,42	7,02	19,61	5,14	0,46	2,33
12. Deli Serdang	3,92	4,49	3,76	44,59	1,91	39,36	0,73	0,00	1,24
13. Langkat	5,06	0,32	3,80	32,98	3,17	50,23	2,86	0,00	1,58
14. Nias Selatan	15,51	0,86	5,17	75,17	0,00	2,42	0,00	0,00	0,86
15. Humbang Hasundutan	17,56	0,00	8,44	51,34	3,56	13,77	3,56	0,00	1,78
16. Pakpak Bharat	0,00	1,85	25,93	53,70	3,70	9,26	3,70	0,00	1,85
17. Samosir	7,75	1,38	2,79	29,58	23,22	22,58	0,00	5,64	7,06
18. Serdang Bedagai	4,46	2,65	1,28	45,53	3,48	40,72	0,68	0,00	1,21
Kota									
19. Sibolga	2,16	1,08	10,81	43,24	13,51	21,62	3,24	1,08	3,24
20. Tanjung Balai	4,69	1,56	3,13	44,99	2,08	39,38	1,56	0,00	2,61
21. Pematang Siantar	10,30	1,82	9,70	47,88	16,36	10,91	0,00	0,00	3,03
22. Tebing Tinggi	4,86	0,81	4,05	54,66	3,24	28,74	1,62	0,00	2,02
23. Medan	1,35	1,69	5,74	53,72	1,01	28,38	2,36	1,35	4,39
24. Binjai	3,62	0,52	8,80	36,06	5,18	43,74	1,55	0,00	0,52
25. Padang Sidempuan	0,92	2,22	8,66	52,97	5,87	17,08	3,83	1,26	7,20
Sumatera Utara	4.53	2.04	4.44	45.90	3.46	34.46	1.69	0.44	3.06
Perkotaan	3.69	2.08	5.46	49.60	2.27	31.39	1.84	0.62	3.04
Pedesaan	5.23	2.00	3.58	42.79	4.46	37.04	1.55	0.29	3.07

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

1.6 KONSUMSI DAN PENGELUARAN RUMAH TANGGA

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat digambarkan oleh besarnya jumlah pendapatan yang diterimanya. Namun demikian, penggambaran tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pendapatan sangat sulit dilakukan karena adanya hambatan teknis di lapangan, terutama pada saat wawancara. Oleh karena itu, pendapatan rumahtangga diperkirakan dari data pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran rumahtangga dibedakan menurut pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Kedua jenis pengeluaran tersebut dapat dijelaskan dengan cukup baik bagaimana pola konsumsi umumnya masyarakat Sumatera Utara.

Di negara-negara berkembang, pengeluaran untuk keperluan makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran rumahtangga. Sebaliknya di negara yang sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumahtangga. Pengeluaran yang sudah dianggap tidak primer lagi, mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya.

1.6.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan penduduk Sumatera Utara semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pengeluaran per kapita pada tahun 2006 sebesar Rp.316.070,- yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp.185.207,- dan Rp.130.862,- untuk pengeluaran bukan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengeluaran diperuntukan untuk konsumsi makanan, berarti sebagian besar dari

penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan).

Tabel 1.6.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Untuk Makanan dan Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 1995 - 2006

Tahun	Makanan		Bukan Makanan		Jumlah	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1995	32.003	66,76	15.932	33,24	47.935	100,00
1996	37.498	66,03	19.291	33,97	56.789	100,00
1997	38.987	65,54	20.499	34,46	59.486	100,00
1998	50.151	68,35	23.223	31,65	73.374	100,00
1999	86.804	72,78	32.465	27,22	119.269	100,00
2000	91.874	72,15	35.465	27,85	127.339	100,00
2001	102.089	70,46	42.809	29,54	144.898	100,00
2002	122.024	68,15	57.018	31,85	179.042	100,00
2003	134.681	67,85	198.497	32,15	198.497	100,00
2004	136.526	64,22	76.059	35,78	212.585	100,00
2005	168.655	60,20	121.933	39,80	287.480	100,00
2006	185.207	58,60	130.862	41,40	316.070	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Bila dilihat dari tipe daerah, persentase pengeluaran per kapita untuk makanan di daerah pedesaan cenderung lebih besar dibandingkan dengan daerah perkotaan, yaitu 67,35 persen untuk daerah pedesaan dan 51,07 persen untuk daerah perkotaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di daerah pedesaan masih cenderung menggunakan pendapatan rumah tangganya untuk keperluan konsumsi makanan. Sedangkan di

daerah perkotaan, porsi untuk konsumsi makanan sudah mulai dialihkan kepada keperluan lain di luar konsumsi makanan. Ini merupakan salah satu indikator bahwa kesejahteraan masyarakat di daerah perkotaan lebih baik dibanding di pedesaan (Tabel 1.6.1.).

Tabel 1.6.2. Distribusi Pengeluaran Makanan dan Bukan Makanan menurut Kabupaten/Kota, 2006

Kota/Kabupaten	Persentase	
	Makanan	Bukan Makanan
(1)	(2)	(3)
Kabupaten		
19. Nias	72,63	27,37
20. Mandailing Natal	74,90	25,10
21. Tapanuli Selatan	71,77	28,23
22. Tapanuli Tengah	69,47	30,53
23. Tapanuli Utara	66,86	33,14
24. Toba Samosir	66,82	33,18
25. Labuhan Batu	63,75	36,25
26. Asahan	64,23	35,77
27. Simalungun	65,71	34,29
28. Dairi	70,62	29,38
29. Karo	68,60	31,40
30. Deli Serdang	58,56	41,44
31. Langkat	58,41	41,59
32. Nias Selatan	74,11	25,89
33. Humbang Hasundutan	73,43	26,57
34. Pakpak Barat	71,30	28,70
35. Samosir	68,90	31,10
36. Serdang Bedagai	62,64	37,36
Kota		
37. Sibolga	61,38	38,62
38. Tanjung Balai	59,65	40,35
39. Pematang Siantar	47,68	52,32
40. Tebing Tinggi	55,39	44,61
41. Medan	43,95	56,05
42. Binjai	58,81	41,19
43. P. Sidempuan	57,73	42,29
Sumatera Utara	58,60	41,40
Perkotaan	51,07	48,93
Pedesaan	67,35	32,65

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Dengan memperhatikan kondisi daerah kabupaten/kota terlihat bahwa persentase pengeluaran untuk makanan di daerah kabupaten relatif lebih tinggi dibandingkan daerah kota. Persentase tertinggi pengeluaran untuk makanan di Kabupaten Mandailing Natal (74,90 persen), disusul Kabupaten Nias Selatan (74,11 persen) dan Kabupaten Humbang Hasundutan (73,43 persen). Sedangkan persentase terendah pengeluaran untuk makanan terjadi di Kota Medan (43,95 persen) dan Kota Pematang Siantar (47,68 persen).

1.6.2. Pengeluaran Untuk Makanan

Tabel 1.6.3. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Makanan Provinsi Sumatera Utara, 2006

Bahan Makanan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Padi padian	40.641	10,41	52.662	20,35	47.427	15,01
Umbi umbian	1.708	0,44	2.116	0,82	1.939	0,61
Ikan	29.897	7,66	24.226	9,36	26.696	8,45
Daging	7.602	1,95	4.015	1,55	5.577	1,76
Telur dan Susu	15.164	3,89	8.128	3,14	11.192	3,54
Sayur sayuran	16.498	4,23	15.439	5,97	15.900	5,03
Kacang-kacangan	4.485	1,15	3.767	1,46	4.080	1,29
Buah buahan	7.281	1,87	4.374	1,69	5.640	1,78
Minyak dan Lemak	8.925	2,29	7.949	3,07	8.374	2,65
Bahan Minuman	8.777	2,25	8.300	3,21	8.508	2,69
Bumbu-bumbuan	3.953	1,01	3.915	1,51	3.932	1,24
Konsumsi lainnya	4.532	1,16	3.085	1,19	3.715	1,18
Makanan dan Minuman jadi	23.197	5,94	9.678	3,74	15.565	4,92
Minuman alkohol	559	0,14	1.186	0,46	913	0,29
Tembakau dan sirih	26.114	6,69	25.469	9,84	25.750	8,15
Total Makanan	199.332	51,08	174.311	67,35	185.207	58,60

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Persentase konsumsi bahan makanan tertinggi adalah pemenuhan bahan makanan padi-padian (15,01 persen), dilanjutkan dengan ikan (8,45 persen) dan tembakau dan sirih (8,15 persen).

Tabel 1.6.3 menunjukkan bahwa bagian terbesar pengeluaran rumahtangga di daerah pedesaan dipergunakan untuk konsumsi makanan dan dibelanjakan untuk bahan makanan yang berupa padi-padian (20,35 persen). Pengeluaran ini jauh lebih tinggi daripada penduduk di daerah perkotaan 10,41 persen. Fenomena ini menunjukkan bahwa penduduk pedesaan masih banyak memprioritaskan kebutuhan akan bahan makananan dibandingkan penduduk daerah perkotaan.

1.6.3. Pengeluaran Untuk Bukan Makanan

Pengeluaran rumahtangga pada kelompok bukan makanan, sebagian besar digunakan untuk pengeluaran perumahan, bahan bakar, penerangan dan air (21,56 persen). Diikuti oleh pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (8,54 persen). Persentase pengeluaran penduduk perkotaan untuk perumahan, bahan bakar, penerangan dan air lebih tinggi (27,14 persen) dibandingkan penduduk daerah pedesaan (15,08 persen). Demikian juga halnya dengan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa, yaitu 10,19 persen berbanding 6,63 persen, biaya pendidikan sebesar 3,63 persen berbanding dengan 2,20 persen serta pengeluaran untuk pajak dan asuransi (1,02 persen berbanding 0,56 persen).

Adapun persentase pengeluaran kelompok bukan makanan, selain yang telah disebutkan di atas seperti pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala, pengeluaran untuk barang tahan lama, pengeluaran kesehatan dan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara lebih tinggi di pedesaan dibandingkan di perkotaan (Tabel 1.6.4). Pengeluaran untuk pakaian, alas kaki dan tutup kepala sebesar 3,60 persen untuk daerah pedesaan dan 2,85 persen di daerah perkotaan. Pengeluaran untuk barang tahan lama sebesar 1,76 persen untuk daerah pedesaan dan sebesar 1,64 untuk daerah perkotaan, pengeluaran kesehatan

berbanding 1,81 dengan 1,64 persen. Sedangkan pengeluaran untuk keperluan pesta dan upacara sebesar 1,02 persen di daerah pedesaan dan 0,73 persen di daerah perkotaan.

Tabel 1.6.4. Persentase Pengeluaran Rata-rata Perkapita Sebulan Untuk Bukan Makanan Provinsi Sumatera Utara, 2006

Bukan Makanan	Perkotaan		Pedesaan		Perkotaan + Pedesaan	
	Rupiah	%	Rupiah	%	Rupiah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perumahan	105.926	27,14	39.028	15,08	68.160	21,56
Aneka barang dan jasa	39.770	10,19	17.158	6,63	27.005	8,54
Biaya Pendidikan	14.183	3,63	5.698	2,20	9.393	2,97
Biaya Kesehatan	6.698	1,72	4.674	1,81	5.555	1,76
Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	11.130	2,85	9.314	3,60	10.105	3,20
Barang tahan lama	6.412	1,64	4.554	1,76	5.363	1,70
Pajak dan Asuransi	3.980	1,02	1.457	0,56	2.556	0,81
Keperluan Pesta dan upacara	2.843	0,73	2.633	1,02	2.725	0,86
Total Bukan Makanan	190.942	48,92	84.516	32,65	130.862	41,40

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

1.7 PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Sampai saat ini rumah masih tetap menjadi kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi selain makanan dan pakaian bagi sebagian besar penduduk. Permintaan unit rumah akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya. Hal tersebut di atas berpengaruh pada tingginya harga rumah, sedangkan tingkat pendapatan penduduk Indonesia relatif rendah. Dengan demikian, banyak rumahtangga yang menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Masalah perumahan merupakan salah satu persoalan utama yang masih memerlukan penanganan cukup serius, baik mengenai kelengkapan sarana perumahannya maupun kelengkapan fasilitas lingkungannya. Rumah yang layak sebaiknya mampu memenuhi syarat kesehatan bagi penghuninya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumahtangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, program kesehatan lingkungan yang bertujuan menjaga, membentuk/mencapai dan melestarikan keadaan lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman juga dilakukan. Hal ini disadari bahwa perumahan saat ini tidak hanya sekedar tempat berteduh tetapi merupakan cermin kehidupan masyarakat. sehingga perlu terwujudnya rumah sehat yang dapat memberikan rasa nyaman dan nikmat bagi penghuninya.

1.7.1. Luas Lantai

Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumahtangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumahtangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumahtangga.

Luas lantai yang dimiliki rumah tangga dapat dilihat dari Tabel 1.7.1. Sebagian besar rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai 20-49 m² (48,67 persen). Rumah dengan luas lantai yang sempit tidak memberikan kenyamanan bagi penghuninya dan akan mengakibatkan orang tidak betah di rumah. Di Sumatera Utara masih ada sekitar 3,14 persen rumahtangga yang memiliki luas lantai kurang dari 20 m². Di pedesaan persentasenya justru lebih besar yaitu sekitar 3,20 persen dibandingkan diperkotaan sebesar 3,06 persen.

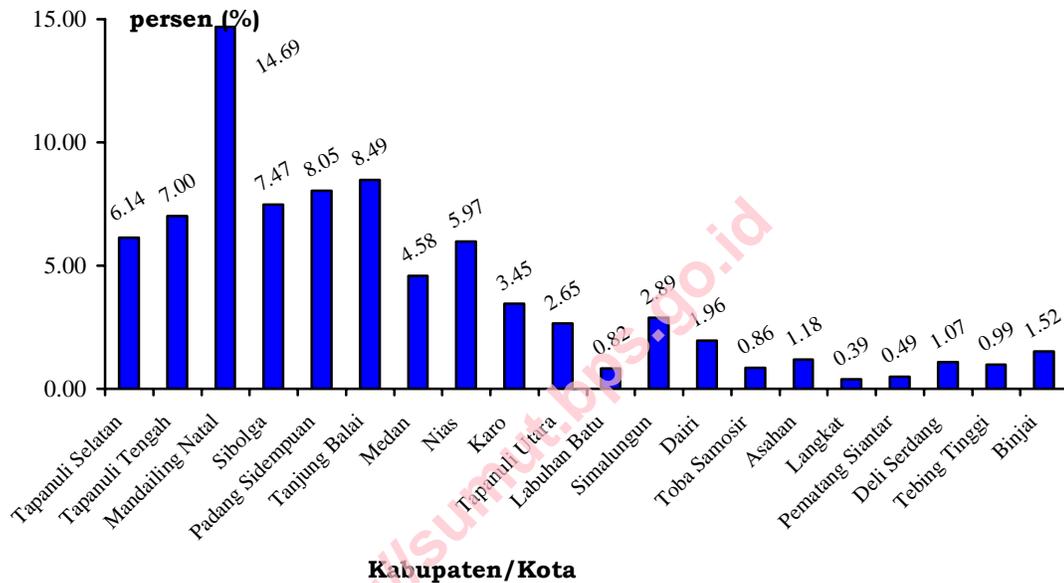
Tabel 1.7.1. Persentase Rumahtangga Menurut Luas Lantai Provinsi Sumatera Utara, 2006

Luas Lantai (M ²)	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
< 20	3,06	3,20	3,14
20 – 49	37,96	56,93	48,67
50 – 59	8,67	10,15	9,50
60 – 99	31,71	23,59	27,13
100 – 149	10,11	3,42	6,33
150 +	8,49	2,71	5,22

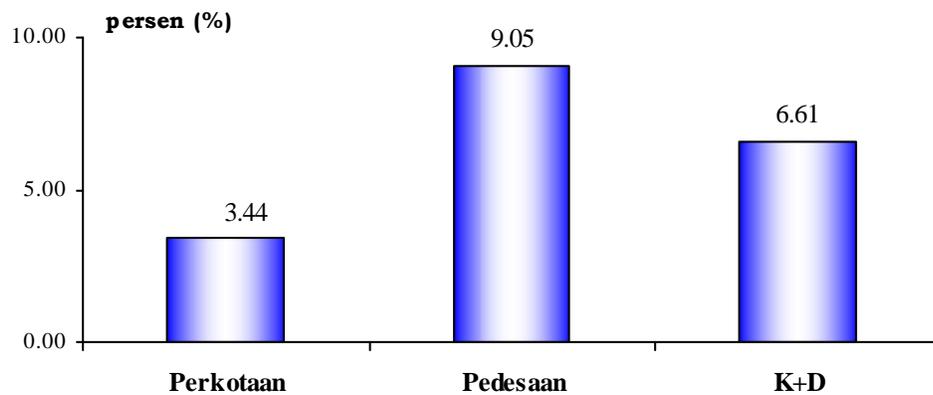
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambaran rumahtangga yang mempunyai luas lantai di bawah 20 m² menurut daerah kabupaten/ kota pada tahun 2006 dapat dilihat dalam Gambar 1.7.1.

Gambar 1.7.1.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Luas Lantai Kurang dari 20 m2 menurut Kabupaten/Kota, 2006



Gambar 1.7.2.: Pesentase Rumahtangga Yang Mempunyai Lantai Terlalu Terbaut dari Tanah Provinsi Sumatera Utara, 2006

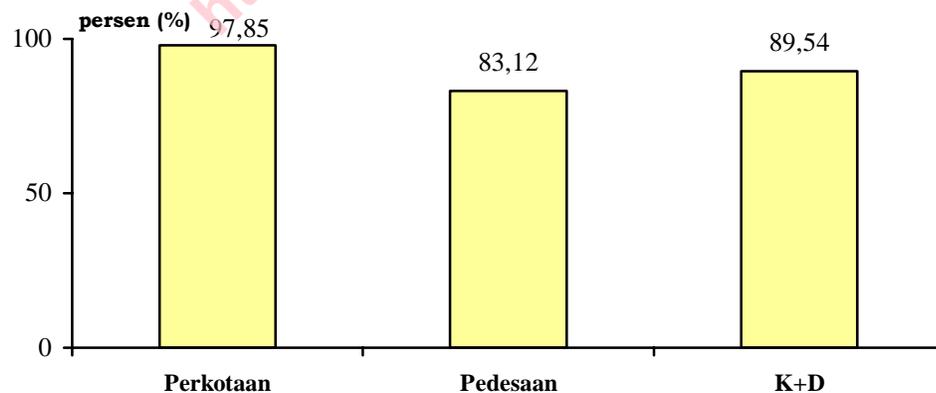


Dari lantai rumah ini dapat dilihat keadaan lantai terluas. Jika lantai terluas terbuat dari tanah jelas kurang sehat, karena sulit dibersihkan jika terkena kotoran atau kuman-kuman penyakit. Sekitar 6,61 persen rumahtangga di Propinsi Sumatera Utara masih tinggal di rumah dengan lantai tanah. Kondisi yang memprihatinkan ini masih menjadi pemandangan di daerah pedesaan, sebab masih 9,05 persen rumahtangga sehari-hari tinggal di rumah yang lantainya kurang sehat (Gambar 1.7.2.).

1.7.2. Sumber Penerangan

Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumahtangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Pada tahun 2006 sekitar (89,54 persen) rumahtangga sudah menggunakan listrik PLN untuk sumber penerangan (Gambar 1.7.3). Kondisi penggunaan sumber penerangan berasal dari listrik PLN di daerah perkotaan lebih tinggi (97,85 persen) dibandingkan di daerah pedesaan (83,12 persen).

Gambar 1.7.3.: Pesentase Rumahtangga Yang Menggunakan Sumber Penerangan dari Listrik PLN Provinsi Sumatera Utara, 2006



1.7.3. Sumber Air Minum

Kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Oleh sebab itu pada saat mencari tempat tinggal, biasanya yang menjadi

perhatian utama adalah tentang keadaan airnya. Dibanding dengan sumber air lainnya, air ledeng merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemarnya relatif cukup besar.

Tabel 1.7.2. Persentase Rumahtangga menurut Sumber Air Minum, Provinsi Sumatera Utara, 2006

Sumber Air Minum	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Ledeng/Air dlm kemasan	52.00	9.56	28.04
Pompa	9.14	11.54	10.49
Sumur terlindungi	29.62	31.30	30.57
Sumur tdk terlindungi	4.93	17.21	11.87
Mata Air tidak terlindung	0.52	9.98	5.86
Mata Air terlindungi	2.56	10.83	7.23
Air Sungai/hujan	1.13	8.91	5.52
Lainnya	0.10	0.67	0.42

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Sebagian besar rumah tangga menggunakan sumber air minum dari sumur terlindungi (30,57 persen) dan ledeng/air dalam kemasan (28,04 persen). Pada daerah pedesaan penggunaan sumber air dari ledeng/air kemasan lebih sedikit (9,56 persen) dibandingkan daerah perkotaan (52,00 persen). Sebaliknya, sumber air minum dari mata air, untuk daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Hal ini wajar karena pada sebagian daerah pedesaan banyak sumber mata air, dan tidak/belum tersedianya fasilitas air ledeng. Hal tersebut disebabkan pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh

rumahtangga, disamping itu juga karena faktor ekonomi masyarakat pedesaan yang belum baik.

1.7.4. Tempat Buang Air Besar

Fasilitas dalam rumahtangga selain sumber air minum dan listrik adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur).

Tabel 1.7.3. Persentase Rumahtangga menurut Tempat Penampungan Akhir Kotoran dan Daerah Tempat Tinggal Provinsi Sumatera Utara, 2006

Tempat penampungan kotoran/tinja	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan+ Pedesaan
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Tangki	71,50	28,51	47,23
2. Kolam/sawah	1,04	1,53	1,32
3. Sungai/Danau/Laut	5,83	17,55	12,45
4. Lainnya	21,63	52,41	39,01
J u m l a h	100,00	100,00	100,00

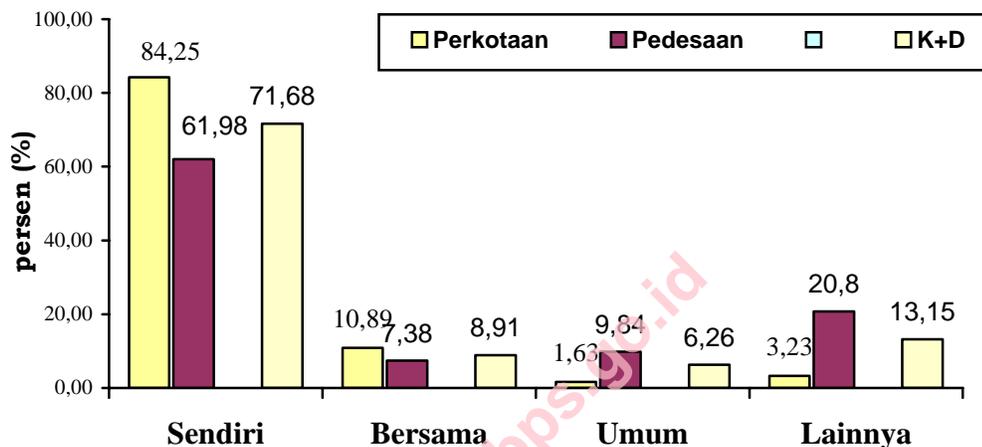
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki merupakan pilihan terbanyak yang dimiliki oleh rumahtangga di daerah perkotaan sebesar 71,50 persen, sedangkan di pedesaan hanya 28,51 persen. Selain penampungan di tempat lain (52,41 persen) di pedesaan juga banyak rumahtangga yang membuang air besar di sungai/danau/laut sebanyak 17,55 persen.

Jika dilihat dari status kepemilikan fasilitas tempat buang air besar, secara keseluruhan sebagian besar rumahtangga sudah mempunyai

fasilitas sendiri (71,68 persen). Di daerah perkotaan 84,25 persen lebih besar dibandingkan daerah pedesaan 61,98 persen.

Gambar 1.7.4.: Pesentase Rumahtangga menurut Kepemilikan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Provinsi Sumatera Utara, 2006



1.7.5. Penggunaan Jenis Dinding dan Atap Rumah

Seperti halnya kepemilikan barang rumahtangga lainnya, penggunaan jenis dinding rumah dan atap rumah dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan pemiliknya. Di Sumatera Utara, kayu/papan paling banyak digunakan sebagai dinding rumah sebesar 48,25 persen, kemudian tembok 45,70 persen. Di daerah perkotaan lebih banyak yang menggunakan tembok sebagai dinding (63,24 persen) dibandingkan kayu/papan (32,11 persen). Sebaliknya, di daerah pedesaan jauh lebih banyak rumahtangga yang menggunakan kayu/papan sebagai dinding rumahnya (60,71 persen) dibandingkan tembok yang hanya 32,16 persen. Hal ini disebabkan di pedesaan lebih mudah dan murah mendapatkan kayu/papan dibandingkan batu bata/tembok, sedangkan di perkotaan lebih mudah mendapatkan batu bata/tembok. Disamping itu, tingkat ekonomi penduduk perkotaan lebih baik dibandingkan di pedesaan.

Tabel 1.7.4. Persentase Rumahtangga menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Dinding Terbanyak Provinsi Sumatera Utara, 2006

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Dinding Terbanyak			
	Tembok	Kayu	Bambu	Lainnya
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
- Perkotaan	63,24	32,11	4,18	0,47
- Pedesaan	32,16	60,71	6,09	1,04
- K + D	45,70	48,25	5,26	0,79

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara

Selanjutnya penggunaan seng untuk atap secara umum paling banyak digunakan rumahtangga di Propinsi Sumatera Utara, yaitu sekitar 84,56 persen rumahtangga (Tabel 1.7.5). Atap ijuk/daun masih cukup besar, yaitu 11,70 persen di pedesaan dan 2,53 persen di perkotaan. Secara ekonomi, seng atau asbes memang lebih murah dibandingkan genteng, namun pemilihan seng/asbes sebagai atap di Sumatera Utara memang tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, tetapi lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat setempat.

Tabel 1.7.5. Persentase Rumahtangga menurut Daerah Tempat Tinggal Dan Jenis Atap Terluas Provinsi Sumatera Utara, 2006

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Atap Terluas						
	Beton	Sirap	Genteng	Seng	Asbes	Ijuk/ Daun	Lainnya
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
- Perkotaan	4,48	0,44	4,00	85,25	2,91	2,53	0,41
- Pedesaan	1,69	0,23	0,93	84,03	1,05	11,70	0,37
- K + D	2,91	0,32	2,27	84,56	1,86	7,70	0,38

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS Provinsi Sumatera Utara